

SKRIPSI

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
ASLI PAPUA DALAM PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KABUPATEN MERAUKE**



Oleh:

ISNIANTY NAHARIAH RESTU RAMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101020

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
ASLI PAPUA DALAM PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KABUPATEN MERAUKE**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Isnianty Nahariah Restu Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101020

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke

Nama Mahasiswa : Isnianty Nahariah Restu Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

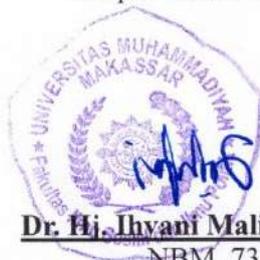

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si


Hardianto Hawing, ST., MA

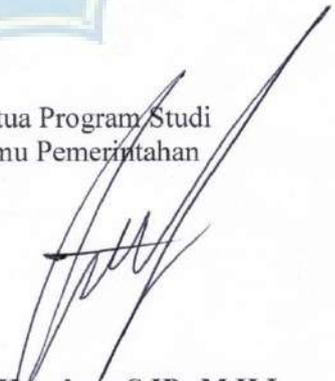
Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207163

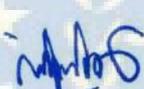
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, tanggal 07 Mei 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 730727

NBM. 992797

Tim Penguji:

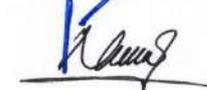
1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

()

2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

()

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()

4. Hardianto Hawing, ST., MA

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Isnianty Nahariah Restu Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Maret 2024

Yang menyatakan,



Isnianty N.R. Ramadhani

ABSTRAK

Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 2024, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik Pada Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Merauke (dibimbing oleh Andi Luhur Prianto dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua yang dilakukan oleh partai politik dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Merauke. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sementara informan pada penelitian ini adalah pihak DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke dan Calon Anggota Legislatif Partai Politik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber data dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini yaitu Pertama, pola terbuka dalam merekrut calon anggota legislatif Perempuan asli Papua dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dimana kedua partai tersebut memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat yang ingin berkontestasi dalam pencalonan anggota legislative. Kedua, pola tertutup dilakukan oleh partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dimana ketiga partai tersebut lebih mengutamakan mengusung internal partai.

Kata Kunci: Calon Anggota Legislatif, Partai Politik, Pola Rekrutmen

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hasnawati, Perempuan hebat yang biasa penulis sebut mama. Penulis persembahkan karya tulis ini untuk mama. Terimakasih sudah menjadi kuat untuk membesarkan anak-anaknya hingga tumbuh dewasa sampai saat ini dan mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih mama selalu ada disamping penulis dan memberikan segala bentuk dukungan, semangat, cinta dan doa yang tiada pernah putus untuk anaknya terus berkembang.
2. Bapak Sunarjo, Cinta pertama dan panutan penulis yang biasa penulis sebut bapak. Terimakasih pak untuk segala usaha yang diberikan kepada

anak-anaknya hingga bisa menempuh pendidikan tinggi. Terimakasih telah memberikan banyak inspirasi, semangat, cinta dan doa yang tulus. Terimakasih pak sudah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar sarjana.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan luar biasa bagi penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku ketua program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) yang telah mengawal proses akademik penulis.
6. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing pertama dan Bapak Hardianto Hawing, S.T.,MA sebagai pembimbing kedua, yang telah dengan penuh membimbing dan memberikan waktunya dalam melakukan perbaikan skripsi yang baik dan benar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mendidik dalam proses belajar penulis.
8. Adikku tercinta, Salza Rezky Amelia. Terimakasih untuk dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis hingga menyempatkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.

9. Saudara tak sedarah, Al.amien Kholifah Fihma. Terimakasih karena senantiasa ada dalam suka dan duka yang dijalani penulis. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan memberikan semangat hingga dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan (LUNATIK) yang menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini, Aliftha S.Massi, Nurul Annisa Anastasya, Nurzafiqah, Nur Fitri Chasana dan Fatima Azahra. Terimakasih selalu saling menguatkan dan saling memotivasi untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Terimakasih atas waktu berharga yang diberikan kepada penulis dan semoga selamanya akan terus seperti ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu bertahan, berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah menepikan ego, kembali bangkit dan selalu meyakinkan diri untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke” ini penulis susun masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Pikir	23
D. Fokus Penelitian.....	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Informan.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Pengabsahan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
B. <i>Affirmative Action</i> dalam Partai Politik di Kabupaten Merauke.....	51
C. Hasil Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke	57
D. Hasil Penelitian Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Di Kabupaten Merauke	60
E. Pembahasan Penelitian.....	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif DPRD Merauke (2019) . 4	
Tabel 1. 2 Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif DPRD Merauke (2024) . 4	
Tabel 4. 1 Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif dan Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024.....	58
Tabel 4.2 Daftar Calon Tetap Perempuan Asli Papua dan Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu	7
Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 4. 2 Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Indikator Rekrutmen Terbuka.....	63
Gambar 4. 3 Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Indikator Rekrutmen Tertutup	68
Gambar 4. 4 Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Indikator Rekrutmen Terbuka dan Rekrutmen Tertutup.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemilihan umum langsung merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi. Salah satu unsur yang terlibat secara kompetitif dalam pemilihan umum adalah partai politik, sebab partai politik memiliki peran sentral dalam konstruksi sistem demokrasi. Disamping menjadi struktur kelembagaan politik yang memiliki tujuan untuk meraih posisi dan pengaruh politik, partai politik juga diakui sebagai elemen tak terpisahkan dari demokrasi. Dikatakan demokratis suatu negara jika ada partai politik di negara tersebut, karena pada hakikatnya partai politik adalah wujud kebebasan warga negara untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya (Labolo 2022).

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen partai politik. Rekrutmen politik berhubungan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai hingga kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya sendiri, setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader-kader yang demikian maka peluang partai untuk berkembang semakin besar. Dengan kader yang baik maka partai tidak akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyeleksi kadernya serta berpeluang mengajukan calon untuk mengikuti pasar kepemimpinan nasional (Budiardjo 2003).

Dapat dimaknai partai politik dalam melakukan seleksi untuk menetapkan bakal calon yang diusung hendaklah selektif, dimana memilih kader yang benar-benar aktif, baik di dalam kemasyarakatan maupun internal partai. Calon dimaksudkan disini ialah calon yang memperhatikan masyarakat, dekat dengan masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga bisa meningkatkan citra baik terhadap partai.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam analisis keterwakilan politik adalah peran perempuan dalam politik. Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik telah dijelaskan pada Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 3, yaitu "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" kemudian pada pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat perlakuan dan kemudahan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Keterwakilan perempuan dalam politik disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, diterapkan pada pemilu 2004 dan menyatakan adanya batasan minimal 30% calon legislatif perempuan untuk masuk lembaga legislatif. Hal ini terlihat pada bagian kedua Tata Cara Pengangkatan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pasal 65 ayat 1 yaitu "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum secara tidak langsung, hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian politik yang merespon pentingnya kesetaraan gender bagi perempuan dalam politik, sekaligus menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Wulandari 2019). Partisipasi perempuan diproses politik dalam pembuatan kebijakan, menyebabkan isu-isu yang berdampak pada perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya menjadi memadai untuk teratasi.

Pada rekrutmen calon anggota legislatif Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh beberapa partai politik diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai Keadilan Sejahtera (PKS), didapatkan daftar total calon tetap calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada lima daerah pemilihan (dapil) di Merauke pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif DPRD Merauke (2019)

No.	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Perempuan Asli Papua	Persentase Keterwakilan Perempuan
1.	PDI-P	17	12	2	41%
2.	PSI	18	12	3	40%
3.	GERINDRA	17	12	6	41%
4.	PKB	14	12	3	46%
5.	PKS	17	13	-	43%

Sumber; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Persentase keterwakilan Perempuan dalam beberapa partai seperti tabel 1.1 diatas, menunjukkan telah terpenuhinya minimal *quota* 30% keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh partai tersebut. Dari banyaknya keterwakilan Perempuan, didapatkan 14 orang perempuan asli Papua yang direkrut oleh partai-partai tersebut diantaranya 2 orang pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 3 orang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 6 orang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan 3 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tabel 1. 2 Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif DPRD Merauke (2024)

No.	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Perempuan Asli Papua	Persentase Keterwakilan Perempuan
1.	PDI-P	20	10	2	33%
2.	PSI	19	11	5	37%
3.	GERINDRA	19	11	2	37%
4.	PKB	20	10	2	33%
5.	PKS	18	12	-	40%

Sumber; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Adapun persentase keterwakilan Perempuan dalam beberapa partai pada tahun 2024, seperti tabel 1.2 diatas, turut menunjukkan telah terpenuhinya minimal *quota* 30% keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh partai tersebut. Terdapat 11 perempuan asli Papua yang direkrut oleh partai-partai tersebut diantaranya 2 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 5 orang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan 2 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dapat dilihat dari data yang ada, bahwasanya pada tahun 2019 perempuan asli Papua yang direkrut oleh keseluruhan partai berjumlah 14 orang, akan tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan dimana hanya terdapat 11 orang Perempuan asli Papua yang direkrut. Sehingga dengan itu, pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik menjadi penting dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibangun oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua yang dilakukan oleh partai politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau mendeskripsikan tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua yang dilakukan oleh partai politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan, khususnya tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam partai politik.

2. Manfaat Praktis

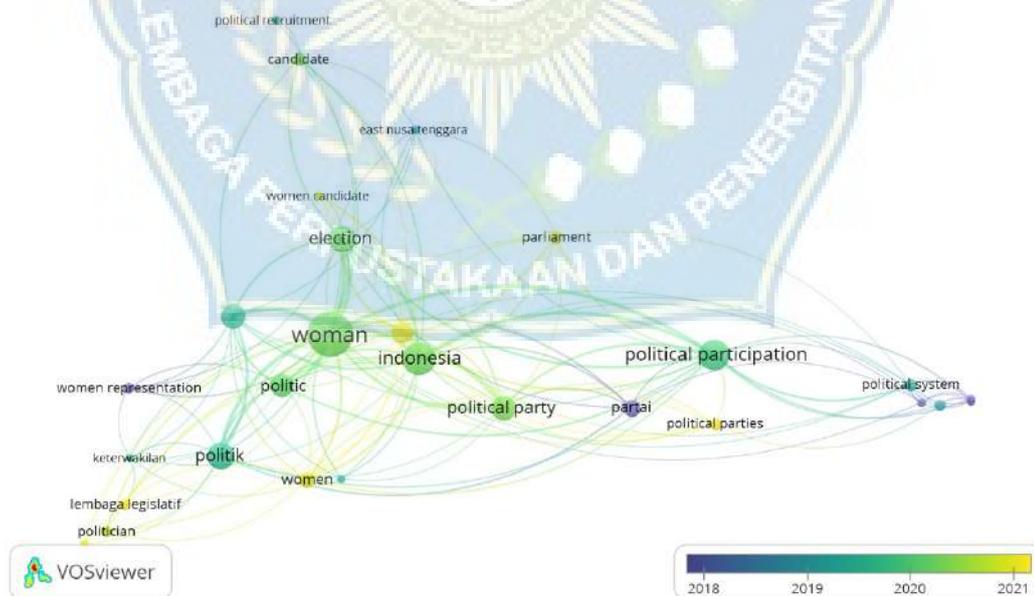
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi partai politik dalam penerapan pola rekrutmen calon anggota legislatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting bagi penulis karena menjadi dasar perbandingan dan acuan untuk memperkaya teori sehingga memberikan kontribusi untuk menyempurnakan penelitian terdahulu dengan konsep yang berbeda dalam penelitian baru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan judul "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke " dengan penelitian terdahulu yang dikelola menggunakan *VOSviewer* sebagai berikut:



Gambar 2. 1 : Penelitian Terdahulu

Pada gambar di atas menunjukkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan aplikasi *publish or perish*, ditemukan 79 artikel jurnal dalam rentan waktu 2013-2023, yang berkaitan dengan kata kunci pendekatakatan *Women's political participation*; rekrutmen politik; legislatif; partai politik.

Artikel-artikel ini secara cermat dikelola melalui penggunaan aplikasi *vosviewer*. Hasil dari visualisasi *vosviewer* mengelompokan 5 klaster. Klaster 1 dengan warna kuning mencakup 6 item yaitu *Woman candidate*, *parliament*, *woman*, *political parties*, lembaga legislatif dan *politician*. Klaster 2 berwarna hijau dengan 9 item yaitu *candidate*, *woman*, *political party*, *politician*, Indonesia, *politic*, *politik*, keterwakilan dan *election*. Klaster 3 berwarna biru yang terbagi atas 3 item yaitu *political recruitment*, *political system* dan *east Nusa Tenggara*. Klaster 4 berwarna ungu yang terbagi atas 2 item meliputi *women representation* dan partai.

Dalam konteks penelitian sebelumnya, terdapat persamaan maupun perbedaan yang menonjol antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti sekarang. Terdapat persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada pola rekrutmen yang dilakukan oleh suatu partai politik dan partisipasi politik perempuan dalam partai politik. Sebagaimana yang tercantum dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Proses Rekrutmen Politik Partai Perindo pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Semarang” (Kurniasih 2021) dan penelitian terdahulu yang berjudul “Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah

pada Pemilu 2019” (Basri and Lestari 2021). Jurnal-jurnal tersebut menggaris bawahi pentingnya mengkaji pola rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam memaksimalkan keterwakilan perempuan yang berkaitan dengan Undang-Undang responsif gender, mengenai adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam kursi parlemen sehingga kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat teratasi.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada pola rekrutmen pada calon anggota legislatif Perempuan secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan, lebih spesifik mengkaji pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua dalam partai politik. Pada penelitian terdahulu juga hanya mengkaji pada satu partai politik saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji 5 partai politik yang dipilih berdasarkan ideologi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap partai.

B. Tinjauan Teori

1. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotnya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara

konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Rosana 2012).

Partai politik merupakan pilar utama negara demokrasi yang fungsinya belum tergantikan oleh lembaga manapun. Kemajuan dan kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh kemajuan dan kualitas partai politik yang ada (Sutarto 2022). Partai politik merupakan elemen penting dalam dinamika politik suatu negara. Partai politik dianggap sebagai sarana bagi seseorang atau sekelompok individu untuk memperoleh kekuasaan (Rosana 2012).

Gabriel A. Almond berpendapat bahwa Partai Politik adalah organisasi manusia yang mempunyai pembagian tugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (ideal objective), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara mencapai tujuan secara lebih pragmatis menurut tahapan jangka pendek sampai dengan jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Majid and Fitriyah n.d., 2022).

Selanjutnya, menurut Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan untuk memimpin partainya dan atas dasar kekuasaan tersebut untuk memberikan keuntungan materiil dan keadilan bagi para anggota partainya (Octavia 2022).

Joseph La Palombara mengkaitkan keberadaan partai politik dengan perjuangan elit dalam memperoleh kekuasaan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam batasannya berikut ini, "Partai politik adalah organisasi formal yang sadar diri, tujuan utamanya adalah untuk menempatkan dan memelihara orang-orang pejabat publik yang akan mengendalikan, sendiri atau dalam koalisi dan pemerintahan"(Saili and Suryanef 2005).

Dalam hal ini, La Palombara menambahkan, penguasaan terhadap aparat pemerintah berarti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, penafsiran, dan pengambilan kebijakan negara. Di sisi lain, penekanan pada bentuk organisasi formal partai politik dimaksudkan untuk membedakannya dengan gerakan massa, kampanye tidak terstruktur untuk mempengaruhi opini publik, dan bentuk aksi politik kolektif lainnya, seperti gerakan mahasiswa, demonstrasi dan upaya lain untuk menyerang kandidat tertentu untuk menggantikannya dengan kandidat lain.

Mark N. Hagopian memberikan batasan atau definisi partai politik dengan fokus utama pada fungsi partai dalam mempengaruhi kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan dalam definisi berikut, "partai politik yaitu perkumpulan yang dibentuk untuk mempengaruhi isi dan pelaksanaan kebijakan publik untuk mendukung prinsip atau kepentingan ideologis tertentu melalui penggunaan kekuasaan secara langsung atau melalui partisipasi dalam pemilihan" (Syamsir and Suryanef 2005).

Sigmund Neuman mengatakan ada tiga fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut (Rizki 2019):

1. Sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik.

Dalam komunikasi politik, partai politik merupakan perantara penting yang menghubungkan kekuatan sosial dan ideologi dengan institusi formal pemerintah dan menghubungkannya dengan tindakan politik dalam komunitas politik. Melalui fungsi tersebut, partai politik menyampaikan dan memasukkan pandangan individu dan kelompok tertentu ke dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi landasan hukum.

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang sering kali dapat diterapkan dalam masyarakat tempat ia berada. Hal tersebut merupakan bagian dari proses penentuan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, ideologi, hingga hak dan kewajiban. Komunikasi dan sosialisasi politik berkaitan erat dengan proses pendidikan politik, yang mempunyai implikasi penting dalam demokrasi.

2. Sebagai sarana rekrutmen politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon anggota lembaga perwakilan, yang kemudian calon tersebut dipilih oleh rakyat. Fungsi ini erat kaitannya dengan persoalan pemilihan pemimpin baik kepemimpinan internal partai serta kepemimpinan nasional pada umumnya. Untuk kepentingan internalnya sendiri, masing-masing partai

membutuhkan kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader seperti itulah partai mampu berkembang lebih jauh. Selain itu, partai politik juga berlomba-lomba untuk menambah dan memperluas keanggotaannya. Maka ia berusaha menarik sebanyak mungkin orang untuk menjadi anggotanya.

3. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)

Dalam negara demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap wajar dan mempunyai tempatnya masing-masing. Peran partai politik sangat diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi melalui kerja sama antar elite politik. Dalam konteks kepartaian, pimpinan partai merupakan elite politik. Partai politik juga dapat memberikan hubungan psikologis dan organisasi antara warga negara dan pemerintahnya. Selain itu, para pihak juga dapat mengkonsolidasikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan yang berkembang dalam kelompok-kelompok di masyarakat.

2. Pola Rekrutmen Partai Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik (Budiardjo 2003).

Menurut Affan Gaffar, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan politik di suatu negara, agar sistem politik dapat berfungsi

sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan dan melindungi masyarakat (Gaffar 1919). lebih lanjut, Ramlan Surbakti menyatakan rekrutmen politik adalah seleksi, pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil peranan tertentu dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, yang mengkhususkan pada orang-orang yang memiliki potensi sehingga partai politik menyeleksi dan menempatkan mereka sebagai calon pemimpin, baik dalam skala nasional maupun dalam kewilayahan (Surbakti 1992).

Pola rekrutmen politik menjadi indikator penting untuk mengamati perkembangan dan perubahan dalam masyarakat politik. Pola rekrutmen politik mengungkap proses perubahan ekonomi, infrastruktur politik, derajat politisasi, dan partisipasi politik masyarakat (Crotty and Katz 2005).

Menurut Rush dan Althoff, pola rekrutmen politik terbagi atas dua pola yaitu (Rush and Althoff 2007):

1. Rekrutmen terbuka.

Rekrutmen terbuka adalah sistem yang didasarkan pada ujian terbuka. Pola rekrutmen terbuka merupakan sistem rekrutmen yang memberikan kesempatan kepada individu yang memenuhi persyaratan tertentu dan berkualitas sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan politik atau pemerintahan.

2. Rekrutmen tertutup.

Rekrutmen tertutup adalah sistem rekrutmen administratif berdasarkan

patronase. Sistem patronase disebut juga sistem kekerabatan karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan ikatan kerabat dan kekeluargaan. Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu, seperti teman dekat elite partai atau orang-orang dekat partai, pengusaha dan perorangan.

Dalam rekrutmen partai politik diatur pula keterwakilan Perempuan dalam politik yang disebut dengan Sistem Quota dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Undang-undang tersebut mewajibkan bahwa kepengurusan dalam tiap partai politik harus mencakup 30% perempuan. Aturan ini menjadi landasan untuk dijaminnya hak politik perempuan.

Terdapat tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen partai politik (Sutarto 2022), yaitu sebagai berikut:

1. Rekrutmen politik merupakan indikator sensitif dalam mengkaji nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam suatu masyarakat politik.
2. Pola rekrutmen politik mencerminkan dan mempengaruhi masyarakat.
3. Pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam suatu masyarakat politik.

Riswanda Irawan menyatakan terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen politik, yaitu sebagai berikut (Pamungkas 2009):

1. Isu politik membuat setiap calon pemimpin terpilih harus memaksimalkan kemampuan dan upayanya untuk menyeimbangkan segala kontroversi yang terjadi di negeri ini agar dampaknya dapat diminimalisir. Sehingga, umpan tersebut menjadi daya tarik masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin masa depan.
2. Kekuasaan rill, artinya seorang calon pemimpin harus mempunyai teknik-teknik yang tersimpan dalam pikirannya untuk dikembangkan ketika menjadi seorang pemimpin. Konsep ini mengandung cara untuk mempengaruhi masyarakat luas agar dapat dipercaya memimpin dalam jangka waktu yang panjang dan langgeng.
3. Faktor terakhir ialah “memasuki suatu sejarah”, artinya setiap pemimpin tentu ingin nama dan jasanya selalu dikenang di benak masyarakat dan setiap calon pemimpin harus menerapkan konsep ini sebelum terpilih menjadi pemimpin.

Sementara itu, menurut Leijennar dan Niemaler, partai politik akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan calon legislatifnya, antara lain sebagai berikut (Surbakti 1992):

1. Ciri-ciri berkaitan dengan kemampuan antara lain menjadi pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, mempunyai semangat dan antusias yang tinggi serta memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu politik
2. Ciri-ciri yang melekat meliputi jenis kelamin, umur, suku dan penampilan.

3. Derajat orientasi lokal mencakup komitmen terhadap bidang yang dipilih, populer di tingkat lokal, dukungan besar-besaran terhadap partai politik dan organisasi sosial.
4. Agama, norma dan nilai termasuk ketaatan beragama, kebajikan dan kestabilan dalam kehidupan berkeluarga.
5. Pengalaman politik meliputi pengalaman politik sebagai anggota partai.

3. Partisipasi Politik Perempuan

Keterwakilan politik perempuan sangatlah penting jika kita ingin membangun demokrasi yang bersahabat gender (gender democracy) (Nurchahyo 2016). Partisipasi politik perempuan memerlukan peningkatan kesetaraan peran dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, dimulai dengan partisipasi langsung dengan memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam struktur masing-masing partai politik (Hidir and Susanti 2015).

Dalam dunia politik, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Kesetaraan gender dalam politik menjadikan perempuan sebagai agen perubahan yang mempunyai potensi besar untuk membawa perubahan positif. Oleh karena itu, peran perempuan harus dimulai dari pemberdayaan, kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan diperlukan agar perempuan dapat berdaya dan juga harus didukung oleh peluang, pendidikan, materi dan keterwakilan politik (Moser 2012).

Menurut Myron Wiener partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela perempuan yang melakukan berbagai aktivitas seperti pengamat politik, pembicara, aktivis, anggota parlemen, dan lain-lain, dengan demikian perempuan harus berpartisipasi aktif dalam bidang politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengembangan kebijakan. Sifat partisipasi yang bersifat sukarela artinya tidak ada paksaan, termasuk dalam partisipasi politisi Perempuan oleh komunitas politisi perempuan. Inti dari hal ini adalah upaya untuk menggali dan memberdayakan potensi yang dimiliki perempuan itu sendiri (Warjiyati 2016).

Ann Philips berpendapat bahwa partisipasi politik perempuan ini bukan sekadar perang gagasan, namun harus dipahami lebih dari itu, bahwasanya partisipasi perempuan dalam politik mempunyai arti penting tersendiri. Ketika partisipasi politik diartikan sebagai kehadiran aktor-aktor politik, maka konsep keterwakilan perempuan menjadi faktor penting yang perlu dibahas. Prinsip keterwakilan bukan sekedar mewakili kelompok tertentu saja namun konsep keterwakilan menyangkut persoalan daya tanggap dan akuntabilitas (Kiftiyah 2019).

Ketika mempertimbangkan hubungan perempuan dan politik di Indonesia, model keterkaitan yang diikuti bukanlah politik seksual atau politik feminis liberal, melainkan analisis konflik sosial di mana politik seksual atau feminisme menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi “oposisi” yang permanen. Artinya, keberadaan perempuan sebagai mitra

sejajar dengan laki-laki bukanlah soal konflik melainkan soal solidaritas dan persatuan demi keberhasilan pembangunan sebagai cita-cita nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah “politik berperspektif gender” (YULIANI 2016).

Milberthd mengklasifikasikan partisipasi politik perempuan sebagai berikut (Mukarom 2008):

1. Apatis, yaitu tidak aktif dan menarik diri dari proses politik
2. Spectator, yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum
3. Gladiator, yaitu yang ikut serta dalam proses politik
4. Pengerik, yaitu dalam bentuk partisipasi inkonvensional

Memperhatikan tinggi rendahnya tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, Paige membagi partisipasi politik perempuan menjadi empat kategori yaitu (Mukarom 2008):

1. Aktif, artinya jika seseorang mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah
2. Apatis (pasif-tertekan), yaitu ketika kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah
3. Militan radikal, yaitu jika kesadaran politik tinggi namun kepercayaan terhadap pemerintah rendah
4. Pasif, yaitu ketika kesadaran politik rendah dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi.

Dalam menjalankan partisipasinya, perempuan menghadapi banyak kendala. Menurut Margaret Lycette, setidaknya ada empat kendala partisipasi perempuan dalam politik, terutama karena (Lycette 1994):

1. Perempuan secara bersamaan menjalankan dua peran, yaitu peran reproduktif dan peran produksi di dalam dan di luar keluarga
 2. Perempuan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dibandingkan laki-laki karena perbedaan kesempatan
 3. Adanya hambatan budaya terkait pembagian kerja secara seksual dan bentuk interaksi antara perempuan dan laki-laki yang membatasi mobilitas Perempuan
 4. Terdapat hambatan hukum bagi perempuan seperti dilarang memiliki tanah, mengikuti program pendidikan atau keluarga berencana tanpa persetujuan suami atau ayah.
4. ***Affirmative Action***

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa suatu kelompok/golongan tertentu (gender atau pekerjaan) mendapat kesempatan yang sama dengan kelompok/golongan lain di bidang yang sama. Dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang memberikan keistimewaan khusus kepada kelompok tertentu (Arka 2021). *Affirmative action* dikenal juga dengan kebijakan yang berasal dari pemerintah dengan tujuan untuk menolong kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti kelompok

termarjinalkan (kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lain-lain) (Chairiyah 2019).

Menurut Clayton dan Crosby, *affirmative action* itu dimaksudkan untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan yang bersifat substantif dan bukan sekedar kesetaraan formal bagi kelompok tertentu, seperti perempuan dan kelompok minoritas, di mana mereka kurang terwakili dalam posisi-posisi yang penting (Clayton and Crosby 1992).

Sejalan dengan itu menurut Tom Campbell bahwa *affirmative action* sebagai “kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dianggap tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat dari sejarah diskrimasi”. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif yang berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia (Arka 2021).

Tujuan dari kebijakan *affirmative action* yang memihak perempuan dengan mekanisme kuota adalah untuk meningkatkan jumlah perwakilan perempuan, yang mewakili identitas kelas atau kelompok tertentu dengan harapan bahwa asas keterwakilan akan bekerja secara optimal mengubah agenda kebijakan dan menggeser prioritas kebijakan yang selama ini menjadikan perempuan tersisih (Arianto, Yandri, and Yani 2022). Menurut

Azza K, kebijakan *affirmative action* memiliki tiga sasaran yaitu sebagai berikut (Amier 2023):

1. Mempunyai sifat yang sementara namun tetap konsisten, dengan tujuan untuk melihat ketika sasaran pada kebijakan telah tercapai, kemudian jika suatu kelompok sudah berintegrasi maka kebijakan tersebut dapat ditarik kembali.
2. Kebijakan ini dapat menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam mencapai suatu kesempatan.
3. Membawa dampak positif pada suatu institusi agar dapat lebih bisa meminimalisir suatu bentuk ketidaksetaraan gender.

Terdapat tiga landasan atas berlakunya *affirmative action* (Chairiyah 2019), yaitu :

1. Faktor sejarah, khususnya pembahasan mengenai upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan, telah berlangsung lama, bahkan pada saat negara masih menjadi wilayah jajahan Belanda.
2. Faktor filosofis yaitu terdapat dua hal penting yang harus dijadikan pertimbangan yaitu tujuan dibentuknya suatu negara dan pemenuhan dari salah satu prinsip demokrasi.
3. Dasar konstitusi dan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam konsitusi dan Undang-Undang Indonesia, salah satunya di dalam pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan”.

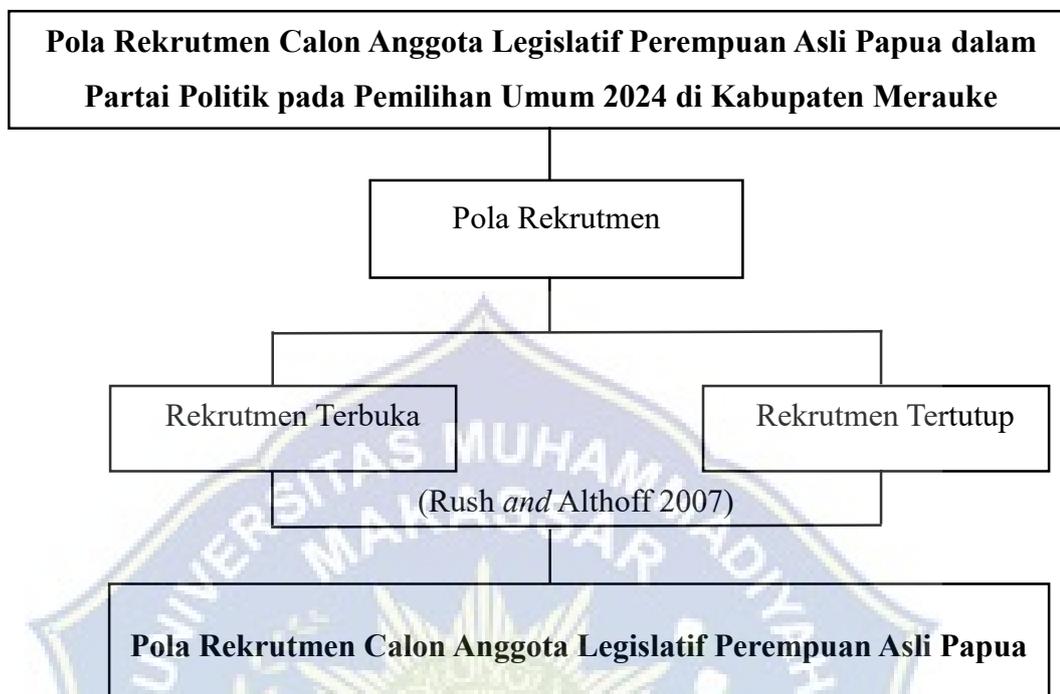
Dahlerup menambahkan bahwa kebijakan *affirmative action* yang efektif akan menghasilkan partai politik yang secara aktif merekrut perempuan untuk memenuhi kuota. Selain itu, jumlah minimum perwakilan perempuan (massa kritis) pada gilirannya dapat mempengaruhi norma-norma dan budaya politik. Ditambah lagi, kaum perempuan melalui perwakilannya tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang feminis (Rahmatunnisa 2016).

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke, peneliti membuat kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pembahasan hasil penelitian. Fungsi dari kerangka pemikiran yaitu agar penelitian ini berfokus pada objek yang akan diteliti. Dengan adanya kerangka pemikiran ditujukan agar penelitian dapat fokus pada rumusan masalah yang dibentuk sebelumnya sehingga ditemukan jawabannya.

Berikut kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Kerangka Pikir



Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua, diantaranya rekrutmen secara terbuka dan rekrutmen secara tertutup yang dilakukan oleh kelima partai diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai Keadilan Sejahtera (PKS) Penelitian ini akan mengkaji rekrutmen yang dilakukan oleh kelima partai tersebut dan mengevaluasi sejauh mana partisipasi perempuan asli Papua dalam seleksi calon anggota legislatif yang ada di Kabupaten Merauke.

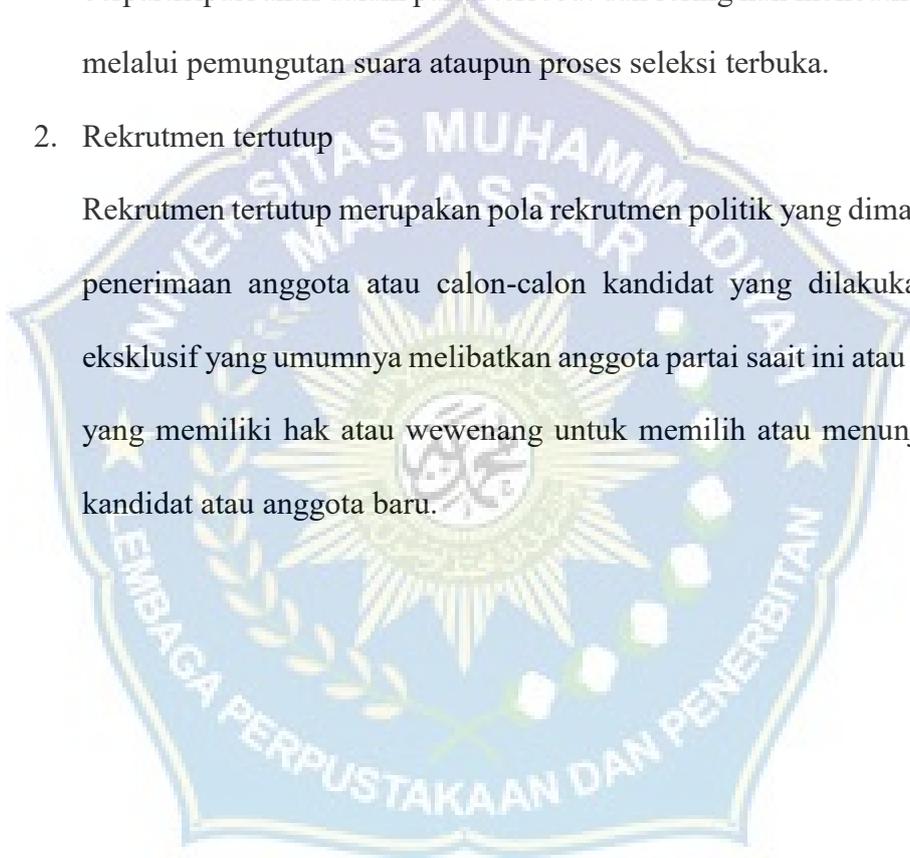
E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka merupakan pola rekrutmen politik dimana dalam prosesnya dilakukan secara transparan yang dimana memberikan kesempatan kepada individu tanpa memandang latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam partai tersebut dan sering kali melibatkan seleksi melalui pemungutan suara ataupun proses seleksi terbuka.

2. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup merupakan pola rekrutmen politik yang dimana proses penerimaan anggota atau calon-calon kandidat yang dilakukan secara eksklusif yang umumnya melibatkan anggota partai saat ini atau elit partai yang memiliki hak atau wewenang untuk memilih atau menunjuk calon kandidat atau anggota baru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilaksanakan selama satu bulan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. Menurut Bogdan dan Biklen, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan and Biklen 1997).

Tujuan dari penggunaan penelitian kualitatif adalah untuk mencari pemahaman mendalam tentang suatu gejala, peristiwa atau kenyataan yang hanya dapat dipahami jika peneliti menggali secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan yang ada di permukaan (Semiawan 2010).

2. Tipe penelitian

Tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Kim, Sefcik, and Bradway 2017).

Dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, penelitian deskriptif memberikan gambaran menyeluruh dan memberikan observasi dari suatu penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pola rekrutmen yang dijalankan partai politik dalam menyeleksi calon anggota legislatif.

C. Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke” adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang bertujuan untuk memilih informan yang mempunyai pengetahuan mendalam dan mampu menjelaskan fakta tentang objek penelitian (Lenaini 2021)

Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Maria Salome Kanden, S.Sos	MK	Bendahara DPC Partai PDI-P
2.	Nataniel Palittin, ST	NP	Ketua DPD Partai PSI
3.	Budi Cahyono	BC	Ketua DPC Partai Gerindra
4.	Hj.Al Mar'atus Solikah, SH.I, M.A.P	AM	Ketua DPC Partai PKB
5.	H. Slamet S.E	ST	Ketua DPD Partai PKS
6.	Rosina Y.M. Kebubun	RK	Ketua KPU Merauke
7.	Maria Salome Kanden, S.Sos	MK	Calon Anggota Legislatif Partai PDI-P
8.	Martha Yermina Mugujai	MM	Calon Anggota Legislatif Partai PSI
9.	Agnes Theresia M. Nautje	AN	Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra
10.	Leonora Rokubun	LR	Calon Anggota Legislatif Partai PKB
11.	Rini Lestari, S.Pd.I.	RL	Calon Anggota Legislatif Partai PKS

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber dan metode (Adlini et al. 2022), antara lain:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah tindakan mengamati secara langsung suatu objek di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam tahap tertentu.

2. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data wawancara merupakan metode interaktif dimana peneliti berkomunikasi langsung dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan. Wawancara terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan dan biasanya dilakukan dalam format tanya jawab.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi melibatkan penggunaan berbagai jenis dokumen atau rekaman tertulis, seperti laporan, catatan, dokumen perusahaan, buku, jurnal ilmiah, dan materi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen mengacu pada rekaman mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, gambar atau karya bersejarah dari individu-individu tertentu.

E. Teknik Pengabsahan Data

Metode validasi data (pengabsahan data) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan data yang dapat dipercaya.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi melibatkan verifikasi keakuratan data yang

dikumpulkan dari sumber data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai verifikasi data dengan berbagai cara dan pembagian waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono 2013).

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan suatu metode validasi data dari sumber yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian divalidasi melalui observasi dan pengumpulan dokumen.

2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah suatu pendekatan di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi suatu temuan atau hasil penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berguna untuk memperkuat keabsahan data yang terkait dengan perkembangan proses dan perilaku manusia, karena pola perilaku manusia cenderung berubah seiring berjalannya waktu. Untuk menjamin kualitas data hasil observasi, peneliti perlu melakukan beberapa sesi observasi dibandingkan hanya mengandalkan satu observasi saja.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah berikutnya dalam pengelolaan data, di mana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan yang diajukan persoalan yang disimpulkan dalam menyusun hasil penelitian (Sugiyono 2013).

1. Reduksi data.

Reduksi data mengacu pada tahapan merangkum sedemikian rupa data-data yang telah dikumpulkan, seperti catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan berbagai materi empiris lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

2. Penyajian data.

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang terstruktur untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tampilan atau penyajian data yang biasa digunakan pada tahap ini berupa teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan yang diambil adalah tahap akhir proses analisis data yang dilakukan dengan melibatkan hasil reduksi data sekaligus mengarah pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Data yang dikumpulkan dibandingkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan guna memecahkan permasalahan yang ada.

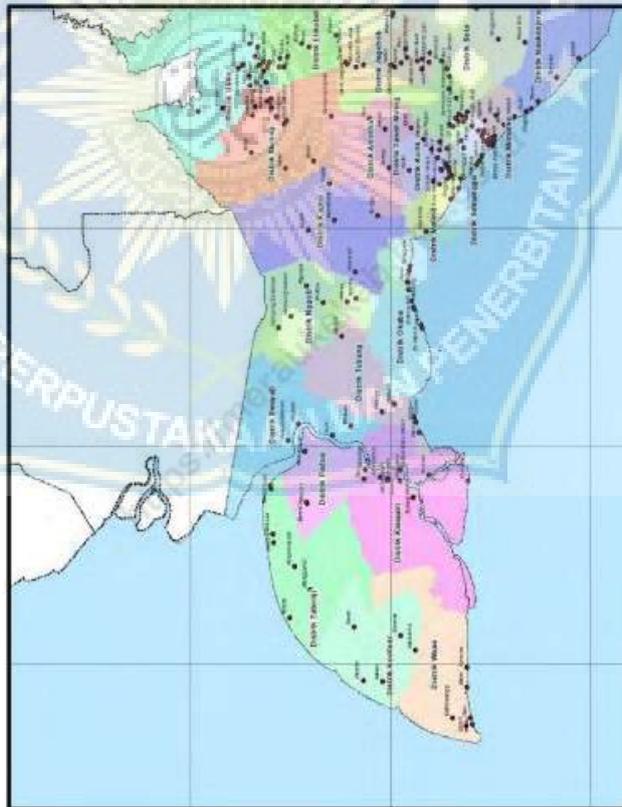
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara 137' – 141' Bujur Timur dan 5' – 9' Lintang Selatan. Kabupaten Merauke memiliki luas 45.013,33 km² dengan 22 Kecamatan meliputi Kimaam, Ilwayab, Tanboji, Waan, Okaba, Tubang, Tabonji, Ngguti, Kurik, Malind, Animha, Merauke, Semangga, Tanah Miring, Naukenjerai, Sota, Muting, Jagebob, Elikobel dan Ulilin.



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Merauke

Sumber: <https://www.meraukekab.bps.go.id>

Mengutip dari “Kabupaten Merauke dalam Angka 2023” oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, dari segi geografis, Kabupaten Merauke berada di ujung timur bagian selatan Negara Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Arafuru. Sebelah Barat Berbatasan dengan laut Arafuru dan Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini.

Berdasarkan “Kabupaten Merauke dalam Angka 2023” oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, jumlah penduduk Kabupaten Merauke pada tahun 2022 Sebanyak 232.357 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 4,97 orang/km². Jumlah Penduduk Laki-Laki sebesar 104.798 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 127.559 jiwa. Sehingga *sex ratio* di Kabupaten Merauke sebesar 109,10.

Jumlah partai politik terdaftar yang ada di Kabupaten Merauke berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke (Sumber: <https://kab-merauke.kpu.go.id>) untuk pemilihan umum tahun 2024 sebanyak delapan belas partai. Partai-partai tersebut diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Buruh (BURUH), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Garda Perubahan Indonesia

(GARUDA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat (Demokrat), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat (UMMAT).

Di tingkat legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke) tercatat sembilan partai yang mendapat tiga puluh kursi DPRD Kabupaten Merauke. Meliputi Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan lima orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan lima orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan empat orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan empat orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan empat orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan tiga orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dua orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan dua orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke. Partai Demokrat dengan satu orang anggota di DPRD Kabupaten Merauke.

2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke

a. Profil KPU Kabupaten Merauke

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke merupakan satuan kerja KPU yang berada di Kabupaten Merauke. KPU Kabupaten Merauke berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Mandala, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua - 99615. KPU Kabupaten Merauke memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Merauke.

b. Tugas KPU Kabupaten Merauke

Secara umum, KPU Kabupaten Merauke memiliki tugas yang sama dengan KPU di tingkat Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Sesuai Pasal 29 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Selanjutnya disebut PKPU 8/2019) menyebut bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
4. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;
dan
6. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU Kabupaten juga memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota.

3. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Merauke

a. Profil Partai PDI-P Kabupaten Merauke

Partai PDI-P memiliki sekretariat perwakilan pusat di daerah-daerah. Perwakilan Partai PDI-P pusat di daerah disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). DPC PDI-P Kabupaten Merauke merupakan perwakilan partai PDI-P di Kabupaten Merauke. DPC PDI-P berlokasi di Jl. Paulus Navi Gang Ampera No.01, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai politik sekuler nasionalis di Indonesia. PDI P dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973. Nilai inti dari Partai PDI P antara lain semangat kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

b. Visi Misi Partai PDI-P

Berdasarkan informasi yang didapat melalui laman resmi <https://www.pdi Perjuangan.id/>, visi partai PDI-P sesuai dengan amanat Pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan meliputi:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan misi Partai PDI-P termaktub dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai tercermin dalam Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Fungsi dan Tugas Partai antara lain:

1) Tujuan Umum

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2) Tujuan Khusus

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;

3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

3) Fungsi

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakikat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

4) Tugas Partai

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

4. Gambaran Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Kabupaten Merauke

a. Profil Partai GERINDRA Kabupaten Merauke

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang berlokasi di Jl. PGT Spadem No.69 Kelurahan Muli, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini merupakan salah satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA sebagai bentuk perwakilan partai di tingkat kabupaten yang mempunyai wilayah kekuasaan di Kabupaten Merauke.

Partai GERINDRA sendiri dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008 yang merupakan partai dengan ideologis sekuler-nasionalis. Partai GERINDRA ini dibentuk dengan arah ingin menciptakan Indonesia yang bangun jiwanya dan bangun badannya, maksudnya disini Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang

bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

b. Visi Misi Partai GERINDRA

Visi Partai GERINDRA menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Visi ini didukung dengan adanya misi partai GERINDRA yaitu:

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.

3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.

5. Gambaran Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Merauke

a. Profil Partai PSI Kabupaten Merauke

Partai PSI Kabupaten Merauke yang berlokasi di Jl. Onggatmid No.18, Kelurahan Muli, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan adalah salah satu partai baru yang dibentuk pada 16 November 2014 dan merupakan partai dengan ideologi nasionalis. PSI adalah partai dengan kekuatan politik baru yang ingin mengembalikan politik ke tempat yang terhormat. PSI lahir dari kesadaran bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang.

Atas dasar tersebut PSI bertekad untuk mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. PSI ingin mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan agar lahir negarawan yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekadar kepentingan pribadi politik jangka pendek.

b. Visi Misi Partai PSI

Visi Partai PSI adalah menjadikan Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

Visi tersebut diwujudkan melalui misi Partai PSI yaitu:

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melibatkan kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

5. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Merauke

a. Profil Partai PKB Kabupaten Merauke

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Merauke yang berlokasi di Jl. Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan adalah perwakilan partai di tingkat Kabupaten. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 23 Juli 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah) yang amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, berwawasan kebangsaan, menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan dan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Oleh karena itu, PKB sesuai Anggaran Dasar (AD) partai merupakan partai berideologi nasionalis agamis.

Tujuan utama PKB yaitu menciptakan tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang

meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Tujuan ini kemudian ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.

b. Visi Misi Partai PKB Kabupaten Merauke

Visi Partai PKB yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Misi Partai PKB terbagi dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-

perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

6. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Merauke

a. Profil Partai PKS Kabupaten Merauke

Partai PKS berlokasi di Jl. Ternate Gang Evadekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini merupakan salah satu Dewan Pengurus Daerah (DPD) sebagai bentuk perwakilan partai di tingkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kekuasaan di Kabupaten Merauke. Partai Keadilan Sejahtera ini awalnya Bernama Partai Keadilan yang dibentuk pada 20 Juli 1998 dan setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibentuk pada tanggal 20 April 2002. Partai PKS merupakan partai politik yang berbasis Islam yang dapat dikatakan memiliki ideologi agamis.

b. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Merauke

Visi partai PKS yaitu menjadi Partai Islam *rahmatan lil 'alamin* yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna menjalankan visi tersebut, Partai PKS memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
2. Mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
3. Meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.
4. Meningkatkan kontribusi Partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di

kawasan, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkuat posisi Indonesia.

B. *Affirmative Action* dalam Partai Politik di Kabupaten Merauke

Diskriminasi terhadap perempuan sering terjadi dalam ranah publik, khususnya dalam dunia politik. Pembatasan akses dan ketidakmampuan perempuan untuk melakukan kegiatan di publik berasal dari budaya patriarki yang mengakar di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan tindakan afirmatif diperlukan untuk mempertimbangkan peran perempuan dalam politik di Indonesia. Adapun seperti yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Merauke, dalam memberikan akses yang sama kepada seluruh anggota kadernya.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dalam Pasal 20 ayat (3) AD/ART PDIP telah memuat tentang ketentuan dalam seleksi pengisian jabatan politik atau publik harus mempertimbangkan paling tidak memuat minimal 30% keterwakilan perempuan. Dalam struktur organisasi DPC PDIP Kabupaten Merauke sendiri menempatkan perempuan juga pada kepengurusan penting partai yaitu pada posisi sekretaris yang dijabat oleh Ibu Maria Yosefina Ema Diparamita dan bendahara yang dijabat oleh Ibu Maria Salome kanden. Pada pencalonan legislatif daerah, DPC PDIP juga memperhatikan ketentuan zipper yaitu setiap tiga orang calon yang dihadirkan, satu diantaranya yaitu perempuan.

Konsolidasi dan pembekalan kader perempuan PDIP dilakukan di kantor DPC PDIP Kabupaten Merauke dan sesekali dilakukan bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terkait ilmu-ilmu politik, strategi politik hingga gerakan visi misi partai sehingga kader perempuan sungguh-sungguh dalam mengenal jauh dunia politik dan tidak takut lagi berpolitik.

Kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat terutama dengan Perempuan pun dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti senam bersama, perlombaan, bakti sosial, dll. Dalam setiap kegiatan tersebut juga berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap acaranya sehingga memberikan semangat kepada kader perempuan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerindra salah satu partai yang telah mengatur keterwakilan perempuan di dalam AD/ART Partai, yakni pada Bab 2 Struktur dan Kepengurusan Pasal 7 Ayat 5, Pasal 8 Ayat 4, Pasal 9 Ayat 4, Pasal 10 Ayat 4, Pasal 11 Ayat 4, dan Pasal 12 Ayat 4. Disebutkan bahwa dalam setiap kepengurusan di tingkat pusat maupun tingkat ranting, untuk tetap memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di dalam struktur partai.

DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke sendiri dalam mendukung keterwakilan perempuan seringkali mengadakan pertemuan rutin, dimana pada pertemuan tersebut melakukan bincang-

bincang tentang seperti apa politik itu dan bagaimana dinamika hingga fenomena politik.

Partai Gerindra selalu melibatkan partisipasi perempuan dalam pertemuan dengan para birokrat dan mengikut sertakan kader perempuan dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke. Kegiatan-kegiatan seperti itu, dimaksudkan agar ilmu yang didapat dalam kaderisasi dapat dituangkan dalam aksi nyata untuk melihat sejauh mana perempuan dapat berani tampil diruang publik.

3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dalam kepengurusan partainya, Partai Solidaritas Indonesia mempunyai persyaratan khusus untuk mengisi komposisi partai politiknya seperti minimal 30% dialokasikan khusus untuk perempuan, Dengan adanya porsi yang besar pada perempuan kebijakan politik PSI tidak hanya sekedar memenuhi syarat 30% perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil melalui keterlibatan aktif perempuan didalamnya. PSI menilai hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen mereka terhadap keadilan, pemberdayaan dan kesetaraan gender.

Dalam struktur organisasi DPD PSI Kabupaten Merauke, menempatkan perempuan juga pada kepengurusan penting partai yaitu

pada posisi wakil ketua yang dijabat oleh Ibu Maria M.S. Nahinde dan wakil sekretaris yang dijabat oleh Ibu Maria Theresia Tan Heatubun.

PSI mengungkapkan bahwa selalu mengutamakan keterlibatan dan keterwakilan perempuan, dimana hal tersebut diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab XIII tentang Keterwakilan Perempuan. AD ART Bab XIII Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa kepengurusan PSI seminimal mungkin menyertakan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Pasal 26 ayat (2) AD ART PSI merupakan turunan dari Pasal 26 ayat (1) bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PSI minimal 30% juga berlaku di kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Ranting PSI.

Untuk dapat memenuhi angka *affirmative action*, PSI menargetkan mencari anggota perempuan ke komunitas-komunitas perempuan, karena PSI menilai bahwa komunitas tersebut memperjuangkan hak perempuan. PSI menilai hubungan antara personal, yaitu antara pengurus partai dan masyarakat akan mempermudah meyakinkan dan membawa lebih banyak bakal calon kader hingga calon legislatif perempuan. Karena, dengan interaksi personal, permasalahan atau hambatan yang dimiliki calon peserta dapat dikomunikasikan dengan PSI, dan PSI akan berusaha untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Merauke dipimpin oleh Ibu Hj. Al Mar'atus Solikah dan dikatakan partai PKB merupakan wujud nyata bahwa seorang perempuan juga mampu untuk memimpin suatu organisasi. PKB sendiri turut memperhatikan adanya keterwakilan perempuan minimal 30% dan menerapkan sistem *zipper* dalam keanggotaan partai maupun calon anggota legislatif.

PKB Kabupaten Merauke turut menjalankan pendidikan politik bagi perempuan seperti diskusi masalah politik dan pelatihan kepemimpinan yang diikuti baik untuk kader partai sendiri maupun masyarakat sekitar. Kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sekitar terutama dengan perempuan pun dilakukan diantaranya pelatihan keterampilan hingga kegiatan sosial keagamaan yaitu pengajian rutin dan lomba kasidah yang dilakukan pada beberapa masjid yang melibatkan kader partai dengan tetap mengedepankan komunikasi dan pendekatan.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik partisipasi perempuan untuk lebih berani tampil diruang publik dan mampu menambah wawasan lebih luas tentang politik. Melalui berbagai inisiatif afirmatif, PKB berkomitmen untuk membuka jalan bagi kelompok-kelompok marginal dan kurang terwakili, memastikan mereka mendapatkan representasi yang adil dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan politik.

5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pasal 9 ayat 1 AD/ART Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi anggota PKS. Rekrutmen anggota laki-laki dan perempuan pun dilakukan dengan tahapan dan proses yang sama.

Pada struktur kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Merauke juga terdapat bidang khusus yang mengurus tentang berbagai kegiatan maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan yaitu Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga melaksanakan program-programnya dengan berpedoman pada visi dan misi partai serta disesuaikan dengan 4 penekanan kaderisasi perempuan yaitu membentuk kualitas perempuan sebagai pribadi, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan perempuan sebagai bagian dalam kelembagaan.

PD PKS menyatakan bahwa perempuan perlu diberdayakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitasnya. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberian pengetahuan kepada kader perempuan dalam berpolitik agar mampu berkompetisi dengan laki-laki. Pembekalan tersebut membuat kader perempuan memiliki daya saing

hingga diharapkan mampu menempati posisi strategis dalam internal partai atau bahkan lolos menjadi anggota legislatif mewakili partainya.

Salah satu kemampuan yang penting dimiliki kader perempuan saat berkecimpung di dunia politik adalah kemampuan lobbying, negosiasi dan kampanye. Lobbying dan negosiasi sangat penting bagi perempuan agar mampu berargumentasi dengan kawan maupun lawan politiknya. Sedangkan kemampuan untuk mengkampanyekan diri sendiri diperlukan agar perempuan bisa membangun citra diri dan mempromosikan dirinya kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk memilih dirinya dalam pemilihan di internal partai maupun dalam Pemilu.

Pelatihan kemampuan lobbying, negosiasi dan kampanye diwujudkan dalam pelatihan character building, personal branding, penokohan dan pelatihan kepribadian. Partai juga mendorong dan memfasilitasi perempuan kader DPD PKS Kabupaten Merauke untuk mengembangkan diri pada kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat seperti senam, pengajian, lomba mengaji dan kasidah.

C. Hasil Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali, dimana penyelenggaranya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu serentak terbagi atas pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg). Pemilu serentak pada tanggal 14

februari 2024 di Kabupaten Merauke dilaksanakan pada 22 distrik, 190 kampung dan 11 kelurahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki berjumlah 83.339 jiwa dan perempuan berjumlah 79.603 jiwa.

Adapun daftar calon tetap calon anggota legislatif yang mewakili setiap partai politik dan hasil pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota Merauke tahun 2024 yang dilakukan mulai tanggal 3-7 maret 2024 oleh KPU Kabupaten Merauke, pada 774 Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024

No.	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Persentasi Keterwakilan Perempuan
1.	PDI-P	20	10	33%
2.	PSI	19	11	37%
3.	GERINDRA	19	11	37%
4.	PKB	20	10	33%
5.	PKS	18	12	40%
6.	GOLKAR	19	11	37%
7.	NASDEM	18	11	38%
8.	BURUH	3	3	50%
9.	GELORA	15	7	32%
10.	PKN	15	12	44%
11.	HANURA	18	11	38%
12.	GARUDA	9	8	47%
13.	PAN	18	10	36%
14.	PBB	20	10	33%
15.	DEMOKRAT	15	13	46%
16.	PERINDO	14	13	48%
17.	PPP	20	9	31%
18.	UMMAT	17	10	37%

Dapat dilihat dari tabel diatas, persentasi keterwakilan perempuan dari setiap partai politik sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi kuota 30% dengan partisipasi perempuan terbanyak terdapat di partai Demokrat dan partai Perindo yang mengusungkan 13 calon anggota legislatif dan paling sedikit terdapat di partai Buruh yang mengusungkan 3 calon anggota legislatif.

Tabel 4.2 Daftar Calon Tetap Perempuan Asli Papua dan Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024

No.	Partai Politik	Perempuan Asli Papua	Persentasi Keterwakilan Perempuan Asli Papua	Anggota Legislatif Terpilih
1.	PDI-P	2	7%	5
2.	PSI	5	17%	1
3.	GERINDRA	2	7%	4
4.	PKB	2	7%	5
5.	PKS	-	-	3
6.	GOLKAR	2	7%	3
7.	NASDEM	4	14%	5
8.	BURUH	2	33%	-
9.	GELORA	2	9%	-
10.	PKN	5	18%	-
11.	HANURA	1	3%	-
12.	GARUDA	3	18%	-
13.	PAN	2	7%	-
14.	PBB	1	3%	-
15.	DEMOKRAT	4	14%	1
16.	PERINDO	3	11%	-
17.	PPP	3	10%	3
18.	UMMAT	7	26%	-
Jumlah Anggota Legislatif Laki-Laki Terpilih				24 Orang
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Terpilih				6 Orang
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Terpilih				1 Orang

Dari partai terdaftar pemilu 2024 di Kabupaten Merauke ditemukan bahwa satu-satunya partai yang tidak memiliki keterwakilan perempuan asli Papua yaitu partai PKS. Partai PKS merupakan partai dengan ideologis agamis Islami, sehingga pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai PKS, terdapat kesulitan dalam merekrut perempuan asli Papua dikarenakan mayoritas orang asli Papua yaitu beragama non muslim.

Dapat juga dilihat dari tabel diatas, keterwakilan perempuan secara keseluruhan yang ada, ditemukan keterwakilan perempuan asli Papua hanya beberapa orang saja dan ini menggambarkan bahwa memang kebijakan *affirmative action* yang sudah diatur dalam Undang-Undang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, karena masih adanya ketakutan menyuarakan pendapat dan menganggap apabila bergabung dalam pencalonan legislatif akan banyak memakan biaya dan waktu sehingga mereka lebih memilih melakukan urusan domestik dibanding aktif dalam urusan publik.

D. Hasil Penelitian Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Di Kabupaten Merauke

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai kesamaan nilai, visi dan misi, cita-cita maupun tujuan untuk memperoleh kedudukan politik tertentu berdasarkan Undang-Undang (UU). Dalam struktur dan sistem politik, partai politik bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang

berkualitas. Oleh karena itu, partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmen dengan sebaik-baiknya. Rekrutmen yang dimaksud disini adalah dalam proses penyeleksian calon kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi partai, guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Sudah seharusnya partai politik mampu menyeleksi orang-orang yang sekiranya mampu menjadi pemimpin dan mampu memberikan edukasi politik yang jelas agar calon yang diusung mampu mengemban tugas dan menjadi perwakilan rakyat yang sebenarnya. Adapun partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif untuk memperhatikan kuota 30% keterwakilan Perempuan, Dimana disini bukan hanya untuk sekedar mengisi kuota tersebut tetapi dapat betul-betul menyeleksi Perempuan yang memiliki kualitas dan mampu kemudian nantinya menyuarakan hak-hak perempuan” (Wawancara bersama, RK. Pada 11 Januari 2024).

Dari pernyataan informan di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke menegaskan bahwa pentingnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik karena menentukan pemimpin yang berkualitas sebagai perwakilan rakyat dan juga perlunya perhatian terhadap calon anggota legislatif perempuan yang direkrut bukan hanya sekedar mengisi syarat 30% keterwakilan perempuan semata tetapi calon anggota legislatif perempuan yang direkrut mampu mengemban amanah dengan baik.

Dalam hal pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Merauke, KPU Kabupaten Merauke menegaskan bahwa setiap partai memiliki

kewenangan untuk menentukan pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif khususnya calon anggota legislatif perempuan asli Papua di Kabupaten Merauke. Berikut kutipan wawancara dengan informan, Ketua KPU Kabupaten Merauke:

”Sejatinya KPU hanya menerima pencalonan oleh partai dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen administrasi sesuai dengan Peraturan KPU. Disamping itu, KPU juga memberikan ruang bagi partai-partai politik yang ingin bekerjasama dalam hal memberikan edukasi mengenai pemilihan umum bagi anggota partai politik. Menjadi sebuah tanggung jawab partai politik untuk mempersiapkan calon anggota legislatif perempuan agar mempunyai kapasitas yang kompeten tidak hanya untuk memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di legislatif”. (Wawancara bersama, RK. Pada 11 Januari 2024).

Berdasarkan penyampaian informasi diatas, Ketua KPU Kabupaten Merauke menegaskan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pola rekrutmen calon anggota legislatif di tiap partai politik. Pola rekrutmen baik terbuka maupun tertutup di tiap partai dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik bersangkutan. KPU Kabupaten Merauke memberikan arahan bagi tiap partai politik baik yang menganut pola terbuka maupun tertutup untuk mempersiapkan calon anggota legislatif perempuan agar tidak hanya memenuhi kuota 30% bagian di legislatif melainkan juga kapasitas dan kemampuan yang kompeten.

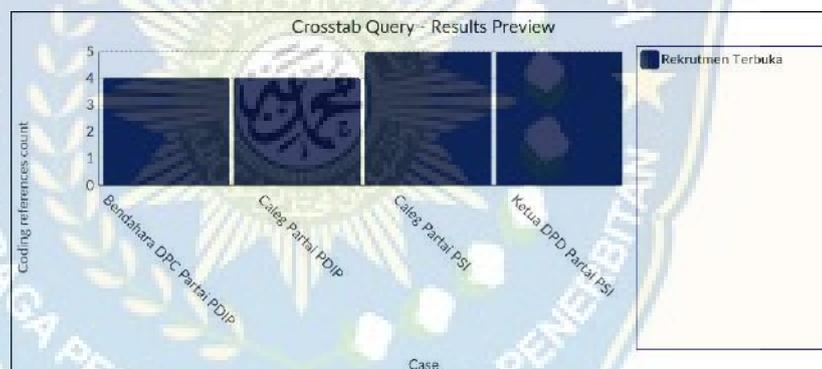
Guna memperjelas hasil penelitian mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli papua dalam partai politik, peneliti

menggunakan indikator pola rekrutmen yang dikembangkan oleh (Rush and Althoff 2007) meliputi rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup:

1. Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen calon anggota legislatif dengan menggunakan pola terbuka memberikan kesempatan kepada anggota partai politik maupun bukan anggota partai politik untuk berkontestasi dalam pencalonan anggota legislatif. Beberapa partai politik di Kabupaten Merauke menggunakan pola terbuka dalam melakukan rekrutmen khususnya untuk calon anggota legislatif perempuan asli papua.

Gambar 4.2 Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Indikator Rekrutmen Terbuka



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara Partai PSI dan Partai PDIP dalam merekrutmen anggota legislatif perempuan asli Papua yaitu dengan menggunakan pola rekrutmen terbuka, hanya saja partai PDIP kurang menonjol dalam mekanisme terbuka karena masih mengutamakan kader perempuannya dibanding masyarakat lain yang mendaftar sebagai calon legislatif. Adapun PSI lebih menonjol karena memaksimalkan mekanisme

terbuka, baik dari kader hingga masyarakat yang ingin maju sebagai calon legislatif tetap diperlakukan secara sama.

Berikut hasil temuan mengenai pola terbuka rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli papua di beberapa partai politik.

1) Partai PSI

Partai PSI merupakan salah satu partai di Kabupaten Merauke yang menggunakan pola terbuka untuk menentukan calon anggota legislatif khususnya perempuan asli Papua. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua DPD PSI Kabupaten Merauke. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Partai PSI melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat umum maupun anggota Partai PSI. Partai PSI juga memberikan peluang lebih bagi masyarakat asli papua khususnya perempuan dan akan menempatkannya di setiap dapil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU”. (Wawancara bersama, NP. Pada 11 Januari 2024).

Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Merauke menambahkan, bahwa pola terbuka yang digunakan Partai PSI dalam merekrut calon anggota legislatif khususnya perempuan asli papua menggunakan sistem yang terbuka. Rekrutmen terbuka ini disebarluaskan melalui media sosial *facebook* dan *instagram* resmi DPD Partai PSI Kabupaten Merauke. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Setelah menyebarkan informasi rekrutmen caleg pada facebook PSI Merauke dan instagram @psi_papuaselatan, selanjutnya Partai PSI melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota legislatif termasuk calon anggota legislatif perempuan asli papua dengan menggunakan metode wawancara”. (Wawancara bersama, NP. Pada 11 Januari 2024)

Disamping itu, Ketua DPD Partai PSI juga mengatakan bahwa calon anggota legislatif dibekali dengan pendidikan politik yang mumpuni. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua DPD Partai PSI:

“Partai PSI memberikan pemahaman kepartaian melalui pendidikan politik kepada calon anggota legislatif. Selain pendidikan politik, para calon anggota legislatif juga dibekali pemahaman komunikasi dengan masyarakat”. (Wawancara bersama, NP. Pada 11 Januari 2024)

Pola terbuka yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Merauke dibenarkan oleh salah satu calon anggota legislatif perempuan asli Papua yang diusung oleh partai tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Calon Anggota Legislatif perempuan asli Papua Partai PSI.

“Saya bukan merupakan kader Partai PSI. saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif karena saya memiliki bekal politik yang didapat melalui pendidikan formal. Selain itu saya tergerak maju mencalonkan diri karena saya perempuan asli papua ingin memajukan budaya yang seharusnya terus dikembangkan sampai sekarang dengan memberdayakan masyarakat asli papua itu sendiri”. (Wawancara bersama, MM. Pada 11 Januari 2024)

Pernyataan informan diatas menegaskan bahwa Partai PSI melakukan pola rekrutmen terbuka kepada calon anggota legislatif perempuan asli Papua. Pola terbuka tersebut juga dilakukan dengan menggunakan seleksi administrasi dan seleksi lanjutan berupa tes wawancara kepada para calon anggota legislatif perempuan asli Papua.

2) Partai PDI-P

Pola terbuka rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua juga dilakukan oleh Partai PDI-P Kabupaten Merauke. Sebagai salah satu partai besar yang ada di Indonesia, Partai PDI-P menggunakan pola terbuka dengan ketentuan khusus. Berikut kutipan wawancara dengan informan, Bendahara DPC Partai PDI-P:

“Partai PDI-P tidak menutup diri dari masyarakat umum yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Namun, sesuai dengan aturan partai, DPC Partai PDI-P juga lebih mempertimbangkan calon anggota legislatif yang berasal dari kader partai. Informasi mengenai pendaftaran calon anggota legislatif Partai PDI-P biasanya disebarkan melalui RRI”.
(Wawancara bersama, MK. Pada 11 Januari 2024)

Bendahara DPC Partai PDI-P Kabupaten Merauke juga menjelaskan, bahwa terdapat tahapan-tahapan seleksi yang diberikan dalam pola terbuka rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

“Secara umum, Partai PDI-P melakukan proses seleksi terhadap bakal calon anggota legislatif. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya tahapan administratif, tahapan penyaringan dan terakhir pengumuman bakal calon”. (Wawancara bersama, MK. Pada 11 Januari 2024)

Pernyataan Ketua DPC Partai PDI-P tersebut diperkuat dengan pernyataan calon anggota legislatif perempuan asli Papua yang diusung. Bahwa kader partai mendapat prioritas untuk maju sebagai sebagai calon anggota legislatif. Berikut kutipan wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan asli Papua dari Partai PDI-P:

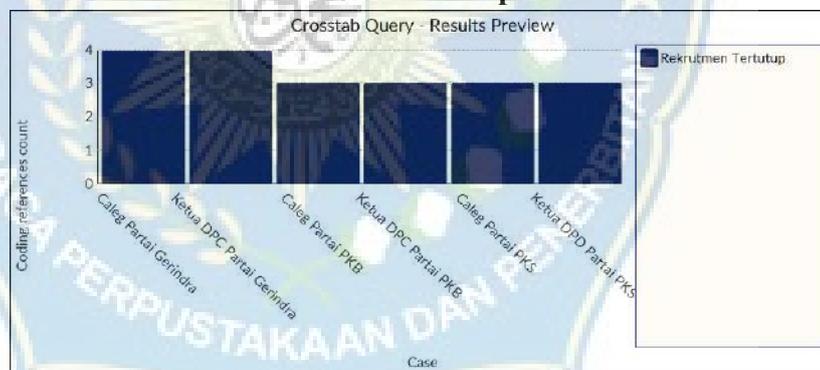
“Sebelum menjadi calon anggota legislatif, saya diajak untuk bergabung menjadi kader Partai PDI-P. Sebagai seorang kader, tentu mendapat kewajiban untuk menjalankan visi misi partai dan aktif menjalankan kegiatan politik di masyarakat”. (Wawancara bersama, MK. Pada 11 Januari 2024)

Sehingga berdasarkan penjelasan informan diatas, pola terbuka yang dilakukan oleh Partai PDI-P dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan asli Papua tidak sepenuhnya dapat dikatakan terbuka. Mengingat Partai PDI-P memiliki aturan partai untuk mempertimbangkan kader partainya terlebih dahulu. Proses seleksi yang dilakukan ada pola terbuka rekrutmen juga lebih kompleks dengan adanya tahapan penyaringan yang dilakukan oleh internal partai.

2. Rekrutmen Tertutup

Pola rekrutmen tertutup pada dasarnya lebih mementingkan sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam pelaksanaan rekrutmen. Pola rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dengan penguasa partai atau orang berpengaruh lain dalam suatu partai. Pola ini tidak memberikan kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk dapat bergabung dalam suatu rekrutmen politik. Sebaliknya, orang-orang yang telah menjadi kader partai memiliki lebih banyak peluang untuk dilibatkan dalam menerima suatu mandat tertentu.

Gambar 4.3 Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Indikator Rekrutmen Tertutup



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PKS melakukan rekrutmen secara tertutup. Dimana partai Gerindra lebih menonjol dikarenakan tetap konsisten memilih calon anggota legislatifnya berdasarkan internal partai atau kader partai, sedangkan untuk Partai PKB dan Partai PKS

menerapkan apabila tidak memungkinkan kader partai untuk dicalonkan, partai akan memilih orang diluar partai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih dalam dunia politik ataupun sosial.

Ketiga Partai politik tersebut, memiliki pandangan khusus mengenai penggunaan pola tertutup. Pola tertutup dinilai lebih mudah dan mengutamakan kepentingan anggota atau kader partai. Berikut temuan penulis tentang penggunaan pola tertutup rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua di Kabupaten Merauke.

1) Partai Gerindra

Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang memiliki banyak anggota partai lebih menitik beratkan pada komposisi kader untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra yang menyatakan:

“Partai Gerindra memiliki pola tertutup dalam rekrutmen calon anggota legislatif. Hal ini dikarenakan Partai Gerindra memiliki banyak anggota dan dikhawatirkan apabila pola yang digunakan terbuka, maka akan terjadi lonjakan pendaftar yang tinggi. Disamping itu, pola ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan dan amarah anggota partai yang tidak lolos tahap pencalonan”. (Wawancara bersama, BC. Pada 11 Januari 2024)

Terkait dengan calon anggota legislatif perempuan asli Papua, Partai Gerindra memiliki kuota khusus. Berikut kutipan

wawancara terkait calon anggota legislatif perempuan di Partai

Gerindra:

“Partai Gerindra mengutamakan internal partai. Khusus untuk kader masyarakat asli Papua, Partai Gerindra memberikan porsi 60% dari total calon legislatif termasuk didalamnya 37% bagian bagi calon legislatif perempuan asli papua.” (Wawancara bersama, BC. Pada 11 Januari 2024)

Pola tertutup seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke dibenarkan oleh salah satu calon anggota legislatif perempuan asli Papua yang diusung. Berikut kutipan wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan asli Papua Partai Gerindra:

“Saya mengikuti pengkaderan selama satu tahun untuk belajar mengenai ilmu politik. Setelah berproses selama satu tahun, saya mendapat dukungan dari internal partai untuk maju dalam pencalonan anggota legislatif. Pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra cukup ketat karena harus melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara.” (Wawancara bersama, AN. Pada 11 Januari 2024)

Berdasarkan informasi tersebut, Partai Gerindra memberikan pola tertutup rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua. Partai Gerindra melalui pola rekrutmen tersebut memberikan porsi lebih dari setengah calon legislatif bagi kader masyarakat asli Papua dan sepertiganya merupakan perempuan asli Papua yang nantinya diajukan ke KPU Kabupaten Merauke.

2) Partai PKB

Partai PKB yang juga merupakan partai besar di Indonesia memiliki pola tertutup untuk rekrutmen calon anggota legislatif. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ketua DPC PKB terkait dengan pola rekrutmen calon anggota legislatif:

“Partai PKB menggunakan pola tertutup dengan mengutamakan kader. Apabila tidak terpenuhi jumlah kader yang akan dicalonkan, partai akan mencari masyarakat yang memiliki kemampuan politik serta visi dan misi yang sesuai dengan partai”. (Wawancara bersama, AM. Pada 11 Januari 2024)

Salah satu calon anggota legislatif perempuan asli Papua dari Partai PKB membenarkan bahwa Partai PKB menggunakan pola tertutup dan mengutamakan kader partai dalam pencalonan anggota legislatif. Berikut kutipan wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan asli Papua dari Partai PKB:

“Saya merupakan kader partai sejak tahun 2018. Sejak menjadi seorang kader, saya selalu aktif mengikuti kegiatan partai dan sosial. Selanjutnya pada tahun 2024 ini, saya mendaftar calon anggota legislatif”. (Wawancara bersama, AM. Pada 11 Januari 2024)

Sehingga berdasarkan penjelasan informan tersebut, Partai PKB melakukan rekrutmen calon anggota legislatif menggunakan pola tertutup dengan mengutamakan kader. Hal tersebut bertujuan untuk menjaring kader yang memiliki potensi dan kemampuan mumpuni sebagai anggota legislatif. Namun,

apabila jumlah calon anggota legislatif dari partai tidak terpenuhi maka Partai PKB akan menyeleksi masyarakat yang memiliki kemampuan politik serti sesuai dengan visi misi partai.

3) Partai PKS

Partai PKS sebagai salah satu partai berideologi agamis di Indonesia, memiliki cara tersendiri untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Berikut kutipan wawancara ketua DPD PKS Kabupaten Merauke:

“Partai PKS menggunakan pola tertutup dalam menentukan calon anggota legislatif. Pola tertutup yang digunakan memprioritaskan kader internal yang lebih terarah dalam menjalankan visi misi partai secara tepat dan amanah.” (Wawancara bersama, ST. Pada 11 Januari 2024)

Pola tertutup yang digunakan oleh Partai PKS melibatkan tokoh agama dalam menentukan calon anggota legislatifnya. Menjadi hal yang sulit bagi Partai PKS untuk menentukan calon anggota legislatif khususnya perempuan asli Papua yang mayoritas beragama nasrani atau non muslim.

Ketua DPD Partai PKS juga menambahkan, bahwa di DPD PKS tidak ada keterwakilan perempuan asli Papua. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Merauke:

“Pola tertutup yang digunakan melibatkan peran tokoh agama dalam menentukan bakal calon anggota legislatif. Di DPD PKS memang tidak ada perempuan asli papua

karena kembali pada ideologi partai kami adalah agama muslim dimana tentunya kami kesulitan apabila mencari perempuan asli papua yang beragama islam karena mayoritas orang asli papua beragama nasrani. Selain itu apabila ada yang ingin kami rekrut mereka tidak bersedia sehingga itu masih menjadi tantangan pada partai PKS bagaimana meyakinkan perempuan asli Papua untuk turut aktif dalam politik sebagai perwakilan rakyat Papua”. (Wawancara bersama, ST. Pada 11 Januari 2024)

Terkait dengan pola tertutup yang disampaikan oleh ketua DPD Partai PKS tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu calon anggota legislatif yang diusung. DPD Partai PKS belum memiliki calon anggota legislatif perempuan asli Papua untuk pemilihan umum tahun 2024. Kendati demikian, untuk lebih memperkuat hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai PKS tentang pola tertutup, penulis telah melakukan wawancara dengan seorang calon anggota legislatif perempuan Partai PKS. Berikut kutipan wawancara dengan calon anggota legislatif dari Partai PKS:

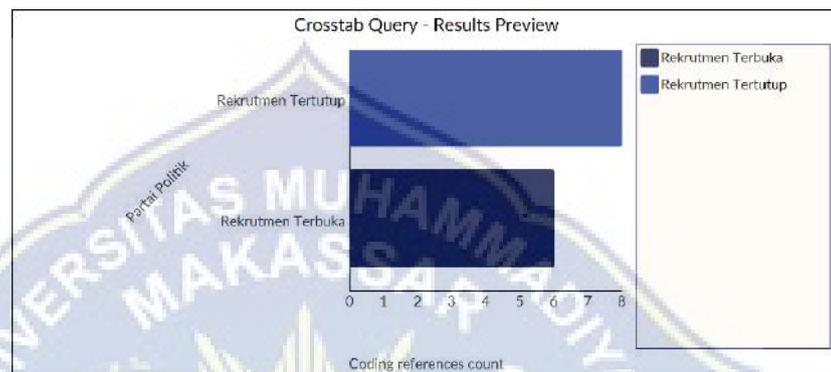
“Kendati bukan kader partai, namun saya direkrut untuk maju sebagai calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 ini”. (Wawancara bersama, RL. Pada 11 Januari 2024)

Berdasarkan penjelasan informan diatas, Partai PKS Kabupaten Merauke menggunakan pola tertutup untuk merekrut calon anggota legislatif perempuan asli Papua. Pola tertutup yang digunakan lebih mementingkan kader partai dan masukan tokoh agama. Pola tertutup ini menyebabkan kendala khususnya

terkait dengan keterwakilan perempuan asli papua dalam pencalonan legislatif.

E. Pembahasan Penelitian

Gambar 4.4 Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Indikator Rekrutmen Terbuka dan Rekrutmen Tertutup



Sumber hasil analisis dari NVivo,2024

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh beberapa partai politik dalam indikator rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup, dimana dalam bagian ini terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan penelitian. Sehingga peneliti akan membahas dan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang sebelumnya telah dijabarkan.

Hal ini selaras dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang menganalisis data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Identifikasi perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan tujuan penelitian.

Sejatinya setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat mengambil peran dalam pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28

D Ayat 3 UUD NRI 1945. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Hal tersebut menjadi bukti bahwa negara memberikan jaminan yang kuat atas keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif baik ditingkat pusat hingga daerah. Sejalan dengan pernyataan Tom Campbell dalam (Arka 2021) bahwa perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan untuk kelompok masyarakat tertentu yang dianggap tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi penting di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Chairiyah 2019) bahwa landasan konstitusional dan hukum menjadi dasar penting untuk melaksanakan *affirmative action* khususnya kebijakan khusus mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif menjadi kunci utama dalam membangun demokrasi yang bersahabat gender (Nurchahyo 2016). Bedarkan hasil temuan penulis, lima sampel partai politik di Kabupaten Merauke telah secara aktif memberikan peluang bagi perempuan untuk terjun ke dalam pemerintahan melalui jalur legislatif. Sehingga jika dikaitkan dengan indikator yang disampaikan oleh Milberthd dalam (Mukarom 2008) keterlibatan perempuan dalam partai politik di Kabupaten Merauke termasuk kedalam kategori gladiator. Hal ini karena perempuan di

Kabupaten Merauke tidak hanya memberikan suara namun juga terlibat dalam proses politik secara langsung.

Pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Berdasarkan sampel partai politik di Kabupaten Merauke ditemukan hasil bahwa, pola rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Merauke menggunakan dua pola rekrutmen yakni pola terbuka dan pola tertutup sebagaimana yang dikemukakan oleh (Rush and Althoff 2007) bahwa pola rekrutmen partai politik dapat dilakukan secara terbuka dengan partisipasi masyarakat umum dan pola tertutup dengan menggunakan sistem penunjukan atau pengajuan internal kader. Berikut hasil pembahasan mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dikaitkan dengan partisipasi perempuan asli Papua di Kabupaten Merauke.

1. Rekrutmen Terbuka

Pola terbuka dalam rekrutmen partai politik menurut (Rush and Althoff 2007) adalah sistem yang didasarkan pada ujian terbuka. Pada Pola rekrutmen terbuka, sistem rekrutmen yang dilaksanakan memberikan kesempatan kepada tiap individu yang memenuhi persyaratan tertentu dan berkualitas sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan politik atau pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik di Kabupaten Merauke, serta calon anggota legislatif

perempuan/perempuan asli Papua terkait dengan pola terbuka yang digunakan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan asli Papua di Kabupaten Merauke.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait dengan pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua ditemukan fakta bahwa beberapa partai dalam sampel menggunakan pola rekrutmen terbuka. Partai PSI- dan Partai PDI-P menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan memberikan informasi secara kepada masyarakat umum maupun kader internal partai untuk mendaftarkan diri. Partai politik tersebut selanjutnya melakukan seleksi administrasi dan serangkaian tes untuk mengukur kelayakan calon anggota legislatif. Pengalaman politik, keahlian dalam bermasyarakat, komitmen, visi misi dan nilai-nilai lain menjadi patokan partai politik dalam mengukur kelayakan calon anggota legislatif. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Leijennar dan Niemaler dalam (Surbakti 1992) bahwa setidaknya terdapat lima komponen penting yang menjadi faktor dalam menentukan calon anggota legislatif. Faktor tersebut anatar lain ciri yang berkaitan dengan kemampuan untuk berkomunikasi, ciri yang meliputi jenis kelamin, umur, suku dan penampilan, derajat orientasi lokal, lingkup agama dan norma, serta pengalaman berpolitik.

2. Rekrutmen Tertutup

Menurut Rush dan Althoff (Rush and Althoff 2007), Rekrutmen tertutup adalah sistem rekrutmen administratif berdasarkan patronase/kekerabatan. Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu, seperti teman dekat elite partai atau orang-orang dekat partai, pengusaha dan perorangan. Sehingga pola tertutup ini tidak banyak memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk dapat menjadi calon anggota legislatif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan terkait pola tertutup rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua oleh partai politik di Kabupaten Merauke ditemukan fakta bahwa Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PKS menggunakan pola tertutup dengan memprioritaskan kader internal. Tiap partai memiliki cara tersendiri untuk menentukan calon anggota legislatif perempuan asli Papua. Partai Gerindra memberikan kuota khusus bagi kader asli Papua sebesar 60% (enam puluh persen) bagian dari total calon anggota legislatif yang diajukan ke KPU Kabupaten Merauke. Dalam bagian tersebut terdapat 30% (tiga puluh persen) bagian khusus yang ditujukan untuk perempuan asli Papua.

Dua sampel partai lain yang menggunakan pola tertutup adalah Partai PKB dan Partai PKS. Kedua Partai tersebut sejatinya memiliki dasar ideologi agamis khususnya Islam. Sehingga kedua partai tersebut

menggunakan pola tertutup untuk menyesuaikan ideologi partai dengan calon anggota legislatif yang diusung. Hal ini sesuai dengan pendapat Leijennar dan Niemaler dalam (Surbakti 1992) yang menyatakan bahwa faktor agama, norma, dan nilai keagamaan menjadi faktor penentu dalam menentukan calon anggota legislatif. Partai PKS menggunakan pola tertutup dengan mempertimbangkan masukan tokoh agama. Pola seperti yang digunakan Partai PKS justru berdampak pada antusiasme dan partisipasi calon anggota legislatif perempuan asli Papua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa wawancara yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua dalam partai politik pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Merauke dilakukan dengan dua pola yaitu pertama rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Partai PDIP dan partai PSI, kedua rekrutmen tertutup yang dilakukan oleh partai Gerindra, partai PKB dan partai PKS. Dari kedua pola rekrutmen yang dilakukan tersebut menunjukkan, adanya affirmative action 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003, tetapi ternyata undang-undang tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perempuan terkhusus dalam hal ini perempuan asli papua di kabupaten Merauke, karena masih kurangnya partisipasi dari perempuan asli papua dalam dunia politik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan asli Papua dalam partai politik pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Merauke, diharapkan:

1. Partai politik terutama yang menggunakan pola terbuka, harus memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan transparan dan adil. Hal ini akan

membangun kepercayaan masyarakat dan calon anggota legislatif terhadap partai politik, serta memastikan bahwa yang terpilih adalah mereka yang paling berkualitas dan sesuai dengan visi misi partai.

2. Partai politik yang menggunakan pola tertutup agar lebih terbuka terhadap calon anggota legislatif dari luar kader internal. Keterwakilan yang lebih luas dalam proses politik dapat mencerminkan keanekaragaman masyarakat dan memperkuat legitimasi sistem politik secara keseluruhan.
3. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terus menerus terhadap proses rekrutmen calon anggota legislatif. Ini akan membantu mengidentifikasi masalah potensial dan peluang untuk perbaikan di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, And Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):974–80.
- Amier, Arighie. 2023. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Makassar)." *Jurnal Suara Politik* 1(1).
- Arianto, Akmal, Lara Indah Yandri, And Eznova Yani. 2022. "Kekuatan Politik Limpapeh Rumah Gadang Dalam Lemahnya Regulasi Tentang Kuota Keterwakilan Perempuan." *Jurnal Suara Politik* 1(1).
- Arka, I. Ketut. 2021. "Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(3):749–62.
- Basri, H., And P. Lestari. 2021. "Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019." *Unnes Political Science Journal*.
- Bogdan, Robert, And Sari Knopp Biklen. 1997. *Qualitative Research For Education*. Allyn & Bacon Boston, Ma.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chairiyah, Sri Zul. 2019. "Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan Di Dprd Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar* 2(2):158–84.
- Clayton, Susan D., And Faye J. Crosby. 1992. *Justice, Gender, And Affirmative Action*. University Of Michigan Press.
- Crotty, William J., And Richard S. Katz. 2005. "Handbook Of Party Politics." *Handbook Of Party Politics* 1–560.
- Gaffar, Afan. 1919. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. -.
- Hidir, Achmad, And Susanti Susanti. 2015. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi Kasus Di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)." *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14(1):1–13.
- Kim, Hyejin, Justine S. Sefcik, And Christine Bradway. 2017. "Characteristics Of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review." *Research In Nursing & Health* 40(1):23–42.

- Kurniasih, N. F. A. 2021. "Proses Rekrutmen Politik Partai Perindo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Semarang." *Journal Of Politic And Government Studies*.
- Labolo, M. 2022. "Implementation Of The Public Sector New Normal Policy In The Postcovid-19 Period." *International Journal Of Demos (Ijd)*.
- Lenaini, Ika. 2021. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6(1):33–39.
- Lycette, Margaret. 1994. "Adjusting Project To Overcome Constrant On Women Participation Forum."
- Majid, Irsyad, And Sos Dra Fitriyah. N.D. "Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada Dpd Pdp Jawa Tengah)."
- Moser, Caroline. 2012. *Gender Planning And Development: Theory, Practice And Training*. Routledge.
- Mukarom, Zaenal. 2008. "Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif." *Mediator (Jurnal Komunikasi)* 9(2):257–70.
- Nurchahyo, Abraham. 2016. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6(01):25–34.
- Octavia, A. 2022. "Perempuan Dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019)= Women And Political Parties (Study: Recruitment Of Female Legislative Candidate National Mandate Party Of."
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, (2009), 236
- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2016. "Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 1(2):90–95.
- Rizki, Noviza. 2019. "Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya)."
- Rosana, Ellya. 2012. "Partai Politik Dan Pembangunan Politik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8(1):135–50.
- Rush, Michael, And Phillip Althoff. 2007. "Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa Oleh Kartini Kartono." *Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada*.
- Saili, Syamsir, And Suryanef Suryanef. 2005. "Proses Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan Di Kota Padang." *Jurnal Demokrasi* 4(2).

- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sugiyono, Dr. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.”
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Sutarto, Sutarto. 2022. “Analisis Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Di Dpd Partai Nasdem Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Di Kantor Dpd Partai Nasdem Kota Medan).” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4(1):53–80.
- Syamsir, Syamsir, And Suryanef Suryanef. 2005. “Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang.”
- Warjiyati, Sri. 2016. “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6(1):1–27.
- Wulandari, Indah Dwi. 2019. “Perempuan Dan Partai Politik Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014.”
- Yuliani, Dini. 2016. “Peran Organisasi Wanita Dalam Partisipasi Politik Perempuan.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(2):855–60.



L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke (Ibu Rosina Y.M. Kebubun)



Wawancara dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke (Bapak Budi Cahyono)



Wawancara dengan Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Merauke (Bapak Nataniel Palittin, ST)



Wawancara dengan Bendahara sekaligus Calon Anggota Legislatif DPC Partai PDIP Kabupaten Merauke (Ibu Maria Salome Kanden, S.Sos)



Wawancara dengan Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Merauke (Ibu Hj. Al Mar'atus Solikah, SH.I, M.A.P)



Wawancara dengan Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Merauke (Bapak H. Slamet S.E)



Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Merauke (Agnes Theresia M. Nautje)



Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Partai PSI Kabupaten Merauke (Ibu Martha Yermima Mugujai)



Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Partai PKB Kabupaten Merauke (Ibu Leonora Rokubun)



Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Partai PKS Kabupaten Merauke (Ibu Rini Lestari, S.Pd.I.)

DOKUMEN PENDUKUNG

Hasil Pemilu Dapil 1 DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024			
No.	Partai Politik	Calon Legislatif	Jumlah Suara
1.	PKB	1. Taufi Latatissa S,Sos	1.401 Suara
		2. Anis Sururi S.Pd	614 Suara
		3. Sujud	273 Suara
		4. Asrina	35 Suara
		5. Ali Imran	48 Suara
		6. Beny Pattisia	19 Suara
		7. Asriyanti S.E. P	22 Suara
		8. Presedes Anitu	113 Suara
		Jumlah suara partai	
Jumlah suara partai dan caleg			2.769 Suara
2.	Gerindra	1. Sarah Ariani	356 Suara
		2. Hendrik Noya SH	345 Suara
		3. Hermin Manggala S.Sos	186 Suara
		4. Emanuel Dale	33 Suara
		5. Kristina	103 Suara
		6. Misnuriyana	258 Suara
		7. Yopiayanto	49 Suara
		8. Dominikus Rahayaa	223 Suara
		Jumlah suara partai	
Jumlah suara partai dan caleg			1.953 Suara
3.	PDIP	1. Hilarius F.Y Ulukyana	520 Suara
		2. Irwanto	159 Suara
		3. Maria Silubun	135 Suara
		4. Niny S.S Surawi	47 Suara
		5. Wenseslaus Batseran	140 Suara
		6. Makarius Joannes Letsoin	174 Suara
		7. Charles M S.E	173 Suara
		8. Francesco Valentini Letsoin, S.Sos	84 Suara
		Jumlah suara partai	
Jumlah suara partai dan caleg			1.673 Suara

4.	Golkar	1. Domarsan Pasaribu	2.514 Suara
		2. Aris Tandibua	1.758 Suara
		3. Ir. Agnes Juliana	338 Suara
		4. Yulius Kendek	749 Suara
		5. Robert Kaiba	222 Suara
		6. Katrina Mardiana, S.H	84 Suara
		7. Hendricus Casimirus Dumatubun	131 Suara
		8. Watta C Hemat A.Md	109 Suara
	Jumlah suara partai		337 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		6.242 Suara
5.	Nasdem	1. Tanke Maggi	5.302 Suara
		2. Gerson Alfian Silubun	4.388 Suara
		3. Yohana Palungan	633 Suara
		4. Abdul Rahmad	842 Suara
		5. Christian J Hunila	2.378 Suara
		6. Beata Gewo	363 Suara
		7. Herma A.Ma. L	198 Suara
		8. Priscilla Tania Kalinka	115 Suara
	Jumlah suara partai		182 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		3.403 Suara
6.	Buruh	1. Rizal Panauhe	34 Suara
	Jumlah suara partai		22 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		56 Suara
7.	Gelora	1. Muhammad Saud	527 Suara
		2. Dominikus Dumbon	136 Suara
		3. Susy S.Sos	49 Suara
		4. Muh. Nur	7 Suara
		5. Marselia Sari Utami	10 Suara
		6. Mariuam Husen	1 Suara
		7. Muh. Rizal	389 Suara
	Jumlah suara partai		69 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		1.208 Suara
8.	PKS	1. Pujiono ST	913 Suara
		2. Supadmi A.md	286 Suara
		3. Drs. H. Abu Bakar	661 Suara
		4. Sudadi	296 Suara
		5. Rini Lestari, S.Pd.I	358 Suara

		6. Wardo	247 Suara
		7. Titi Wahyuningsi, S.Pd.	44 Suara
		8. Sirajuddin	160 Suara
		Jumlah suara partai	157 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	3.132 Suara
9.	PKN	1. Haris Rahmat	7 Suara
		2. Kostavina	31 Suara
		3. Fredikus Mahuze	37 Suara
		4. Antonia Kuara	47 Suara
		5. Aris Laurensius	5 Suara
		6. Hasnawati, S.Kom	41 Suara
		7. Purwanti	26 Suara
		Jumlah suara partai	23 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	271 Suara
10.	Hanura	1. Herman Silubun	922 Suara
		2. Marthen Londo	152 Suara
		3. Hasna	12 Suara
		4. Silvia	25 Suara
		5. Joko Prasetyo	17 Suara
		6. Maryanis Unmehopa	26 Suara
		7. Rei Raini, S.Sos	23 Suara
		8. Matheus T	18 Suara
		Jumlah suara partai	107 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.308 Suara
11.	Garuda	1. Alfred B	53 Suara
		2. Abd. Hamid	3 Suara
		3. Helda Joke	29 Suara
		4. Kefinsia Runesi	7 Suara
		Jumlah suara partai	7 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	99 Suara
12.	PAN	1. Riny Dewarusi	88 Suara
		2. Arnoldus Masela	258 Suara
		3. Toto Haryadi	183 Suara
		4. Elisabet Sero Gebze	56 Suara
		5. Matrius Korwa	13 Suara
		6. Agus Wijaksono	32 Suara

		7. Paskalina M	17 Suara
		8. Norbertus T. Itipara	5 Suara
		Jumlah suara partai	63 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	715 Suara
13.	PBB	1. Jarot S.Pd	63 Suara
		2. Firawati SE	25 Suara
		3. Muhammad	133 Suara
		4. A. Juwita	2 Suara
		5. Moh. Racman G	76 Suara
		6. Andika Dewandana	10 Suara
		7. Fransiskus Caverius	18 Suara
		8. Taufik	4 Suara
		Jumlah suara partai	15 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	346 Suara
14.	Demokrat	1. Apolinaris Maturbongs	564Suara
		2. Hettu Koes H	66 Suara
		3. Dionius Samsrubun	157 Suara
		4. Marice Weldamina	105 Suara
		5. Drs. IGe Bertie A	76 Suara
		6. A. Amelia Harib	9 Suara
		7. Suhartini	34 Suara
		8. Novelin Lea Waromi	6 Suara
		Jumlah suara partai	122 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.139 Suara
15.	PSI	1. Ir. Risman S.T M.Ap	703 Suara
		2. Elsyane Nidya R	70 Suara
		3. Drs. Yakobus Walong	249 Suara
		4. Ali Lakuy	103 Suara
		5. Maria Theresia S. Kom	15 Suara
		6. Charles Yakobus	48 Suara
		7. Indah Megawati	14 Suara
		8. Yofa	26 Suara
		Jumlah suara partai	132 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.360 Suara
16.	Perindo	1. Aswar	557 Suara
		2. Jony Joko	248 Suara
		3. Maria Gorethi	48 Suara
		4. Serasi	6 Suara

		5. Siti Nurhannah	7 Suara
		6. Theresia	22 Suara
		7. Meliyana	6 Suara
		Jumlah suara partai	419 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.313 Suara
17.	PPP	1. Dra. Hj. Saraida, M.Si	670 Suara
		2. Edang Mulyadi	101 Suara
		3. Jaya Mulyadi, S.E	14 Suara
		4. Hj. Sriyanti	79 Suara
		5. Nasrul, S.Pd	23 Suara
		6. Yesaya Junior	1 Suara
		7. Malik Badara	206 Suara
		8. Muh. Basir	415 Suara
		Jumlah suara partai	90 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.599 Suara
18.	Ummat	1. Antonius Tappel	24 Suara
		2. Wilhelmina Kaize	22 Suara
		3. Yosafat Heluka, S.A.P. L	24 Suara
		4. Yesaya Isak	5 Suara
		5. Fitalis Kelitubun	3 Suara
		6. Lusia	2 Suara
		7. Carlos Hendrikus	1 Suara
		8. Damianus	13 Suara
		Jumlah suara partai	15 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	109 Suara
Jumlah Keseluruhan Suara Sah			28.641 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah			1.810 Suara
Jumlah Suara Sah/Tidak Sah			30.451 Suara

Hasil Pemilu Dapil 2 DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024			
No.	Partai Politik	Calon Legislatif	Jumlah Suara
1.	PKB	1. Yasin	360 Suara
		2. Syarifah Kiang, S.Pd.I	212 Suara
		3. Damario Sriyono, S.H.I	105 Suara
		4. Evi Ernawati Kristina, S.H	216 Suara
		5. Mozez Barunalabu Ivakdalam, S.Sos	192 Suara
		6. Soni Kartiko Prihandoyo	328 Suara
		Jumlah suara partai	208 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.621 Suara
2.	Gerindra	1. Egidius Johannes Xaverius, S.I.P., M.A.P	324 Suara
		2. Yacky Rewolter Yonatan Noya	595 Suara
		3. Agnes Theresia M. Nautje	297 Suara
		4. Sarce Noriwari	210 Suara
		5. Yakobus Tebay	324 Suara
		6. Agustinus Porsiana	29 Suara
		Jumlah suara partai	279 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.058 Suara
3.	PDIP	1. Maria Salome Kanden, S.Sos	701 Suara
		2. Yohanis Robert Fofied	189 Suara
		3. Suratno, S.T	342 Suara
		4. Sulis Setio Astuti, S.I.P	138 Suara
		5. Debby Meriam Kailuhu	68 Suara
		6. Jeffri Raynold Wayne Papare, S.Sos., M.H	226 Suara
		Jumlah suara partai	225 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.889 Suara
4.	Golkar	1. Hari Bariono Lumban Tobing, S.T., M.Eng	550 Suara
		2. Theodor Tawaru, S.H	233 Suara
		3. Widury Siburian	298 Suara
		4. Dominikus Tiniyap	66 Suara
		5. Paulus Saman, A.Md.Keu	123 Suara

		6. Sara Margareta Christina	545 Suara
		Jumlah suara partai	164 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.479 Suara
5.	Nasdem	1. Johan Frederik Paulus, S.E	1.227 Suara
		2. Arnoldus Moda, S.Sos	539 Suara
		3. Hj. Harnani Maullisa	165 Suara
		4. Drs. Marthen Ganna	1.239 Suara
		5. Fransiskus Komoyap Kamim, A.Md	536 Suara
		6. Rusdiati Tanawali Samkakai	144 Suara
		Jumlah suara partai	232 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	4.082 Suara
6.	Buruh	1. Daniel Emakpa	116 Suara
		2. Julita Mutom	7 Suara
		Jumlah suara partai	47 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	170 Suara
7.	Gelora	1. Marchadi Marwan	33 Suara
		2. Edi Samuel Navi	122 Suara
		3. Yuliana Efrida	15 Suara
		4. Tony Kurtis Mangala	18 Suara
		Jumlah suara partai	22 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	210 Suara
8.	PKS	1. Akbar, S.Pd.I	555 Suara
		2. Ratih Margahayu, A.Md.T	62 Suara
		3. Rian Wahyu Saputra	327 Suara
		4. Obed Rumbrar	44 Suara
		5. Beti Novita Sari, S.Pd	6 Suara
		6. Syahratul Ramadhani Nur Hidayatullah, S.T	132 Suara
		Jumlah suara partai	327 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.214 Suara
9.	PKN	1. Charles Oktovianus Rumbin	61 Suara
		2. H. Talisman, S.Sos	47 Suara
		3. Yosefina Sela Samkakai	12 Suara
		4. Paulus Feliks Weyai	64 Suara
		5. Polly Lumy, S.I.P	23 Suara
		6. Saferina E. Mahuze	10 Suara

		Jumlah suara partai	12 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	229 Suara
10.	Hanura	1. Ramlah	922 Suara
		2. Edoardus Ulukyanan, S.P.T	152 Suara
		3. Stefanus Letsoin	12 Suara
		4. Pia Watunglawar, A.Ma.Pd	25 Suara
		5. Stefanus Kogoya	17 Suara
		6. Albert Roberto Silubun	26 Suara
		Jumlah suara partai	64 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.040 Suara
11.	Garuda	1. Regina Swabra, S.Pd.K., M.Pd.K	133 Suara
		2. Alfred Almodat Unmahopa	20 Suara
		3. Sajudin Runesi	4 Suara
		Jumlah suara partai	21 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	178 Suara
12.	PAN	1. Faizal Tamrin	601 Suara
		2. Jackie Chres Latupeirissa	26 Suara
		3. Fera Sarawan	34 Suara
		4. Ali Syahbana, S.E., M.Si	124 Suara
		5. Carla Carolina	10 Suara
		6. Refry Trian Lysar	14 Suara
		Jumlah suara partai	67 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	876 Suara
13.	PBB	1. Dance Lekruhna Pay	15 Suara
		2. Melisa Christien Mambor, S.Sos	11 Suara
		3. Liborius Waip	18 Suara
		4. Bernadetha Hebertina Ngoranubun	2 Suara
		5. Yahya Ansanay	7 Suara
		6. Arman	4 Suara
		Jumlah suara partai	5 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	62 Suara
14.	Demokrat	1. Berman Dalan Pasaribu, S.Sos., M.A.P	1.220 Suara
		2. Yulia Kleopatra Moiwend, S.E	36 Suara
		3. Yuniwis Sabla, S.Sos	39 Suara
		4. Maria Magdalena Jaik	17 Suara
		5. Nurul Azizah Tamher	16 Suara

		6. Yoseph Matias Paskalis	95 Suara
		Jumlah suara partai	169 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.592 Suara
15.	PSI	1. Yohanes Paulus Uweng	724 Suara
		2. Welmina Yauku	13 Suara
		3. Pandi, S.T	44 Suara
		4. Martha Yermima Mugujai	27 Suara
		5. Norbertus Kororop	22 Suara
		6. Johny Fredy Pepiana, S.T	50 Suara
		Jumlah suara partai	90 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	970 Suara
16.	Perindo	1. Grace Ivon Makagiarsar	75 Suara
		2. Yoseph J.K. Minipko	294 Suara
		3. Yanuarius Vitalis Katabia	87 Suara
		4. Zefanya Maria Pricilla Lefteuw	10 Suara
		5. Gabriel Laiyan	41 Suara
		6. Argelius Ronald Ohoiwutun	16 Suara
		Jumlah suara partai	333 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	856 Suara
17.	PPP	1. H. Ramli	1.318 Suara
		2. Andre Saputra	259 Suara
		3. Susi Arawok	13 Suara
		4. Yakobus RoemSOROP	30 Suara
		5. Yakoba Yapkoran	5 Suara
		6. Ishak	9 Suara
		Jumlah suara partai	94 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.728 Suara
18.	Ummat	1. Fransina Bernadeta Beatrix Atmei	134 Suara
		2. Ciols Tagi Beni	43 Suara
		3. Yulita Kamona, S.H	51 Suara
		4. Denesius Dimor M. Samkakai	9 Suara
		5. Yulianus Nikolaus Atmey	10 Suara
		Jumlah suara partai	17 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	264 Suara
Jumlah Keseluruhan Suara Sah			20.518 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah			1.351 Suara

Jumlah Suara Sah/Tidak Sah			21.869 Suara
Hasil Pemilu Dapil 3 DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024			
No.	Partai Politik	Calon Legislatif	Jumlah Suara
1.	PKB	1. Bernadus Ndiken, S.I.P	1.449 Suara
		2. Muhammad Azis, S.H.I	240 Suara
		3. Dwi Misriyani, S.Pd	55 Suara
		4. Sungkana, S.Pd	155 Suara
		5. Mariyo	68 Suara
		6. Elisabet Supriyati Kaize	9 Suara
		7. Lutfi Hidayah Seknun	581 Suara
		Jumlah suara partai	576 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	3.133 Suara
2.	Gerindra	1. Budi Cahyono	560 Suara
		2. Agus Eko Prasetyo, S.P	1.848 Suara
		3. Juniarti	49 Suara
		4. Widodo, S.E	2.420 Suara
		5. Siti Rabia	58 Suara
		6. John Marthin Resubun	31 Suara
		7. Johanes Joseph Mell	29 Suara
		Jumlah suara partai	683 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	5.678 Suara
3.	PDIP	1. Kostantinus Gebze	695 Suara
		2. Paskalis Toti	435 Suara
		3. Darti	59 Suara
		4. Annas, S.T	1.085 Suara
		5. Muhammad Syafarullah	587 Suara
		6. Maria Novita Tjoa	23 Suara
		7. Pujiono	74 Suara
		Jumlah suara partai	366 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	3.324 Suara
4.	Golkar	1. Wiwid Widya Kristin, S.E	373 Suara
		2. Seki Mardidiyan, S.T	174 Suara
		3. Fransiskus Rumangun	176 Suara
		4. Maria Imaculata Tawayok	344 Suara

		5. Rizal Kusuma Putra	88 Suara
		6. Abidin	149 Suara
		7. Putri Handayani Jawiyah	592 Suara
		Jumlah suara partai	352 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.248 Suara
5.	Nasdem	1. Sugiyanto, S.H., M.M	2.181 Suara
		2. H. Baharuddin	177 Suara
		3. Muntamah	40 Suara
		4. Paskalis Suarubun	50 Suara
		5. Lahamudin Sanaba	369 Suara
		6. Sumarni Kaize	185 Suara
		7. Silas H.J. Kriswirawan Leimena, S.P., M.Si	168 Suara
		Jumlah suara partai	321 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	3.941 Suara
6.	Buruh	1. Alberta Kiring	20 Suara
		Jumlah suara partai	48 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	68 Suara
7.	Gelora	1. Eko Bagus Panuntun	316 Suara
		2. Tirta Yanuar Putra	22 Suara
		3. Christna Iswari	19 Suara
		4. Petrus Yohanis Pesiwarisa, S.H	93 Suara
		Jumlah suara partai	162 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	612 Suara
8.	PKS	1. Ir. Harmini	1.650 Suara
		2. Badrun, S.I.P	916 Suara
		3. Suhanto, S.Kom	852 Suara
		4. Rumiati, S.Pd	23 Suara
		5. Yuli Sulistio	17 Suara
		6. Wahyudi	25 Suara
		7. Rosmala Widijastuti, S.P., M.P	746 Suara
		Jumlah suara partai	259 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	4.488 Suara
9.	PKN	1. Darwin	8 Suara
		2. Fransiska S. Ngada Ndiken	11 Suara
		3. Risky Budi Setyawan	3 Suara
		4. Maria Nelvina Nona, S.Pd	5 Suara

		5. Suparti	4 Suara
		6. Gabriel D. Manggaimu	0 Suara
		Jumlah suara partai	10 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	41 Suara
10.	Hanura	1. Isaias Aldian Cheldri Silubun	112 Suara
		2. Stephanus Hanoatubun	28 Suara
		3. Siti Munabiyah	26 Suara
		4. Ronald Lefteuw	12 Suara
		5. Sainul, S.Pd	79 Suara
		6. Yelinda Djamjik	4 Suara
		7. Hery Matias Amba Pongsamma, S.T	96 Suara
		Jumlah suara partai	55 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	403 Suara
11.	Garuda	1. Matsalim Yamawi Mahuze, S.Sos	78 Suara
		2. Hasrul Abdul Hamid Baba, S.P	56 Suara
		3. Ardiani Julita Sari, S.Pd	8 Suara
		4. Febriyanti Resmi Ningsih, S.Sos	9 Suara
		Jumlah suara partai	23 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	174 Suara
12.	PAN	1. Rifky A. Laraja	558 Suara
		2. Johanna Pipersina Wenno	16 Suara
		3. Isak Ruben Carles Rembe	29 Suara
		4. Darizal Madi	7 Suara
		5. Oktovina Amarency Kaize	11 Suara
		6. Rina Sundari	15 Suara
		7. Eko Prayitno	39 Suara
		Jumlah suara partai	52 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	727 Suara
13.	PBB	1. Emanuel Irianto Wombonggo	11 Suara
		2. Anselma Wambanop Kandam	33 Suara
		3. Sarmidi	26 Suara
		4. Aismawati	5 Suara
		5. Kaharuddin	86 Suara
		6. Duddy Sutisrayudhi	2 Suara
		7. Susiyo	22 Suara
		Jumlah suara partai	24 Suara

	Jumlah suara partai dan caleg		209 Suara
14.	Demokrat	1. Siprianus B.P. Muda, S.Sos	894 Suara
		2. Jan Dolly Moningka, S.E	66 Suara
		3. Yustina Maria Setyany Ukat, S.A.P	80 Suara
		4. Roberth I.Y. Rohrohmana	15 Suara
		5. Felomena Iriyanan, S.Sos	17 Suara
		6. Wisam Ari Sunanto	25 Suara
		7. Norberta Kalemon, A.Md.Pt	7 Suara
	Jumlah suara partai		139 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		1.243 Suara
15.	PSI	1. Slamet Pranoto	333 Suara
		2. Katarina Balagaize	98 Suara
		3. Muhammad Nasori	727 Suara
		4. Karel Ratuarat, S.H	19 Suara
		5. Alowisia Rina Ersonnita Swabra	5 Suara
		6. Ifolitus Heriyanto	231 Suara
		7. Corneles Yacobus Henuk	45 Suara
	Jumlah suara partai		135 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		1.593 Suara
16.	Perindo	1. Sairan	126 Suara
		2. Mulyono Labula	142 Suara
		3. Haryati	18 Suara
		4. Masita	13 Suara
		5. Wahidatur Raina Hoirannisa	17 Suara
		6. Ramli Moy	13 Suara
	Jumlah suara partai		103 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		432 Suara
17.	PPP	1. Agus Irianto, S.Pd.I	1.416 Suara
		2. Dedi Susanto Lauba, A.Md	42 Suara
		3. Surma Suryani	12 Suara
		4. Marianus Kambirop	11 Suara
		5. Radi	141 Suara
		6. Sri Yatmi, S.Pd	15 Suara
		7. Ryan Wicaksono	118 Suara
	Jumlah suara partai		214 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		1.969 Suara
18.	Ummat	1. Marlina Balagaize	44 Suara

	2. Willybrodus Rahayaan	12 Suara
	3. Amirudin	7 Suara
	4. Selestina Bernadinata Komot	4 Suara
	5. Ananias Damsar	4 Suara
	6. Petrus Kalikimbian	15 Suara
	Jumlah suara partai	16 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg	102 Suara
	Jumlah Keseluruhan Suara Sah	30.385 Suara
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.611 Suara
	Jumlah Suara Sah/Tidak Sah	31.996 Suara

Hasil Pemilu Dapil 4 DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024			
No.	Partai Politik	Calon Legislatif	Jumlah Suara
1.	PKB	1. Nyaman Budiman	1.571 Suara
		2. Ruben Flassy, S.I.P	398 Suara
		3. Leonora Rokubun	37 Suara
		4. Hotima Djandjan	35 Suara
		5. Johannes Y.Y. Nongsamen	558 Suara
		Jumlah suara partai	455 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	3.054 Suara
2.	Gerindra	1. Engelberth Jacob Rumlus	223 Suara
		2. Mohammad Ali Muchtar, S.I.P	464 Suara
		3. Dyah Purwanti	40 Suara
		4. Emanuel Kristoforus Alexander, S.H	533 Suara
		5. Yosefa Petronela Ikanubun	16 Suara
		Jumlah suara partai	460 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.736 Suara
3.	PDIP	1. Amirudin Sitompul	825 Suara
		2. Damiana Samderubun, S.Pd.Sd	213 Suara
		3. Brampi Yopi Betaubun, S.H	327 Suara

		4. Antoneta Pitang	22 Suara
		5. Alfaris Sair Lela	210 Suara
		Jumlah suara partai	555 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.152 Suara
4.	Golkar	1. Philipus Pasifikus Edoardus Ulukyanan, A.Md	736 Suara
		2. Rony Limbong	417 Suara
		3. Ir. Paulina Paay, M.Si	170 Suara
		4. Alex Abdon Ferdi Tohatta	51 Suara
		5. Heca Maria Sonella Renyaan	209 Suara
		Jumlah suara partai	345 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.928 Suara
5.	Nasdem	1. Lidya Rayneldis Rahailyaan, S.E	641 Suara
		2. Rikhard Fernatubun	138 Suara
		3. Paskalis Wamudiwa	772 Suara
		4. Mamat Mulyono	205 Suara
		5. Hj. Srinangky Abubakar, S.E., S.H	188 Suara
		Jumlah suara partai	363 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.307 Suara
6.	Buruh	1. Yunius Sidulu	35 Suara
		Jumlah suara partai	30 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	65 Suara
7.	Gelora	1. Jassanu	171 Suara
		2. Patrisius Mbiraka	121 Suara
		3. Maria Magdalena Mahuze	15 Suara
		4. Alexander Rembemia	32 Suara
		Jumlah suara partai	42 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	382 Suara
8.	PKS	1. Suaib	628 Suara
		2. Ananias Couneka, S.I.P	187 Suara
		3. Hj. Saidah	249 Suara
		4. Ilham Dwi Satria, S.Pt	382 Suara
		5. Yugi Retnosari	288 Suara
		Jumlah suara partai	129 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.963 Suara
9.	PKN	1. Drs. Selestinus A. Kahol, M.T	102 Suara

		2. Melania Wolon Bilukande	16 Suara
		3. Kaleb Pahogi	41 Suara
		4. Theresia Gebze	44 Suara
		5. Emanuel Sarto Baragi	217 Suara
		Jumlah suara partai	46 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	466 Suara
10.	Hanura	1. Endang Tri Astuti	66 Suara
		2. Gabriel Seralarat	18 Suara
		3. Raimon Vlorentinus Laiyanan, S.I.P	55 Suara
		4. Erma Suryati	6 Suara
		5. Rudy Yonas Metekohy	499 Suara
		Jumlah suara partai	48 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	692 Suara
11.	Garuda	1. Margaretha Maria	241 Suara
		2. Fitrius Kaize	68 Suara
		3. Ana Maria K. Basik Basik	9 Suara
		4. Yosias Kapasiang	5 Suara
		Jumlah suara partai	58 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	381 Suara
12.	PAN	1. Daniel Samderubun	665 Suara
		2. K. Yakobus Pesiwarisa	137 Suara
		3. Katarina Debora Latoke	13 Suara
		4. Adrianus Gebze	39 Suara
		5. Ika Kartini Chriswandi	5 Suara
		Jumlah suara partai	113 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	972 Suara
13.	PBB	1. Katijo	56 Suara
		2. Maria Hestiana Windy Jaftoran	143 Suara
		3. Tarsis Rahailyaan	7 Suara
		4. Srimulyani	7 Suara
		5. Maximus Kelanit	2 Suara
		Jumlah suara partai	28 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	243 Suara
14.	Demokrat	1. Sarifuddin Sa'ad, A.Md	609 Suara
		2. Ferderika Yosmina Arpiy	102 Suara

		3. Kristianus Cabui	217 Suara
		4. Maria Fatimah Kambin	6 Suara
		5. Edoard Ignasius Sarkol	83 Suara
		Jumlah suara partai	112 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.129 Suara
15.	PSI	1. Edoardus Navana	1.094 Suara
		2. Alekxander Rahabeat	597 Suara
		3. Paskalina Inga, S.E	94 Suara
		4. Idelfonsius Kaawanga	321 Suara
		5. Katarina Krisanta Samkakai	12 Suara
		Jumlah suara partai	82 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.200 Suara
16.	Perindo	1. Bakri Tomia	686 Suara
		2. Ulvia Marissa Mowimo Kahol	32 Suara
		3. Edmundus Anibodata	141 Suara
		4. Sebastianus Urambia	503 Suara
		5. Trivony L. Kaize	15 Suara
		Jumlah suara partai	183 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	1.560 Suara
17.	PPP	1. Ridwan Djais	21 Suara
		2. Marten Benediktus Kunai	182 Suara
		3. Syria Yuliana	87 Suara
		4. Yohanis Samkakai	12 Suara
		Jumlah suara partai	12 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	314 Suara
18.	Ummat	1. Agustina Terepkon	8 Suara
		2. Yohanes Paskalis	186 Suara
		3. Seli Engelberta Kupumim	6 Suara
		4. Andreas Imi	7 Suara
		Jumlah suara partai	12 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	219 Suara
Jumlah Keseluruhan Suara Sah			21.763 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah			1.127 Suara
Jumlah Suara Sah/Tidak Sah			22.890 Suara

Hasil Pemilu Dapil 5 DPRD Kabupaten/Kota Merauke 2024			
No.	Partai Politik	Calon Legislatif	Jumlah Suara
1.	PKB	1. Mulyoto	278 Suara
		2. Mardiansyah, S.H., LI.M., C.Med	1.222 Suara
		3. Ninin Kurniawati, A.Md.Keb	37 Suara
		4. Iskak Wahyudi, S.E	284 Suara
		Jumlah suara partai	168 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.289 Suara
2.	Gerindra	1. Mario Rey Maturbongs	935 Suara
		2. Yohanis Rompon	831 Suara
		3. Martha Leriyan Widianingsih, S.Sos	55 Suara
		4. Jonluc Rober Polibu	344 Suara
		Jumlah suara partai	809 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.974 Suara
3.	PDIP	1. Leonora Didima Parapaga	966 Suara
		2. Donatus Bokripok	352 Suara
		3. Markus Marthen Manu	284 Suara
		4. Stefanus Mega Panda, S.Fi	440 Suara
		Jumlah suara partai	558 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	2.630 Suara
4.	Golkar	1. Novita Elsy Manumpil, S.H	182 Suara
		2. Jeremias Albertus Kepo Mahuze	357 Suara
		3. Boy Sandy Alfredo Beben	23 Suara
		4. Margaretha Sanche Wayoi, S.Sos	48 Suara
		Jumlah suara partai	312 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	922 Suara
5.	Nasdem	1. Tyassiwi Dwi Gandini	1.204 Suara
		2. Afra Dambujai, S.Sos	77 Suara
		3. Samuel Markus Mugujai	1.333 Suara
		4. Nimas Suryani	74 Suara
		Jumlah suara partai	350 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	3.038 Suara
6.	Buruh	1. Erna Juliet Debora Hidungora	97 Suara
		Jumlah suara partai	89 Suara

	Jumlah suara partai dan caleg		186 Suara
7.	Gelora	1. Kosmas Basik-Basik	166 Suara
		2. Rudy Erwin Kidup	137 Suara
		3. Marselina Sance Mahuse	21 Suara
	Jumlah suara partai		166 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		419 Suara
8.	PKS	1. H. Slamet, S.E	1.135 Suara
		2. Rohqiyatun Naimah, S.Pd	121 Suara
		3. Misno	109 Suara
		4. Yurotum S,Sos	17 Suara
	Jumlah suara partai		256 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		1.638 Suara
9.	PKN	1. Gergorius Gego	22 Suara
		2. Siska Bernadetha Leha	31 Suara
		3. H. Sanusi, S.Sos	6 Suara
	Jumlah suara partai		10 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		69 Suara
10.	Hanura	6. Muhamad Ibnu Baha'udin, S.T	467 Suara
		7. Wa Ode Ratima	27 Suara
		8. Gress Dominika Silubun	5 Suara
		9. Muhammad Idris, S.E	9 Suara
	Jumlah suara partai		83 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		591 Suara
11.	Garuda	1. Bartolomeus Abel Karwayu	23 Suara
		2. Salomina Gebze	96 Suara
		3. Amelia Mero Mayu	19 Suara
	Jumlah suara partai		32 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		170 Suara
12.	PAN	1. Nanang Kristiawan	1.680 Suara
		2. Syahril, S.E	29 Suara
		3. Petronela Leftungun	23 Suara
		4. Dita Sarita Dewi	26 Suara
	Jumlah suara partai		228 Suara
	Jumlah suara partai dan caleg		1.986 Suara
13.	PBB	1. Rini Iriyani	6 Suara
		2. Fransiska Kurnia Dewi	7 Suara
		3. Ronalo Monggop Koran	26 Suara

		4. Agustinus Jhon Charles	53 Suara
		Jumlah suara partai	18 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	110 Suara
14.	Demokrat	1. Matheus Liem Gebze, S.H	34 Suara
		2. Yulita Betsy Imbiri	53 Suara
		3. Renhard Van Kaize, S.E	65 Suara
		Jumlah suara partai	88 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	240 Suara
15.	PSI	1. Nataniel Palittin, S.T	96 Suara
		2. Fransiskus Donatus Kakubi	234 Suara
		3. Erni Marthina Sanciana Mugujai	45 Suara
		4. Anastasia Awaniter	22 Suara
		Jumlah suara partai	104 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	501 Suara
16.	Perindo	1. Vivian Almanda Anjarwati	45 Suara
		2. Susy Lumy	11 Suara
		3. Arifin	3 Suara
		Jumlah suara partai	50 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	109 Suara
17.	PPP	1. Muhammad Saiful Rahman	77 Suara
		2. Leander Ardelia	40 Suara
		3. Else Paulina Awi	9 Suara
		Jumlah suara partai	42 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	168 Suara
18.	Ummat	1. Yohanes H. Kewamijai	60 Suara
		2. Fransina Makamur	7 Suara
		3. Maria Padwa	4 Suara
		4. Dethan Justan Selsius Malioi, S.H	92 Suara
		Jumlah suara partai	16 Suara
		Jumlah suara partai dan caleg	179 Suara
Jumlah Keseluruhan Suara Sah			18.219 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah			974 Suara
Jumlah Suara Sah/Tidak Sah			19.193 Suara



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

Nomor : 2872/FSP/A.6-VIII/XII/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Isnianty Nahariah Restu Ramadhani

Stambuk : 105641101020

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Judul Skripsi : ***"Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 18 Desember 2023

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Ahmad Harakan/S.IP., M.HI.
NBM : 1207 163





PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani Merauke – Papua Selatan Telepon. (0971) 321613
fax. 323486

Merauke, 08 Januari 2024

SURAT IZIN
NOMOR: 200.1.2/04
TENTANG
Izin Penelitian

Dasar :

- a. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 2872/FSP/A.6-VIII/1445H/2023 tanggal 19 Desember 2023.
- b. Surat Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 3078/05/C.4- VIII/ XII/1445/2023.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
 Nama : ISNIANTY NAHARIAH RESTU RAMADHANI
 No. Stambuk : 10564 1101020
 Fakultas : Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Judul Skripsi : “ Pola Rekrutment Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Merauke”.
 Jangka Waktu : 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024

KEPALA BADAN

Drs. RAMADAYANTO, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19650112 199003 1 016

Tembusan;

1. Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah, di Makassar
2. Kepala KPU Kab. Merauke, di Merauke
3. Ketua Parpol Se-Kabupaten Merauke, di Merauke



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 85/HM.03.4-SD /9301/1/2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas :

Nama : Isaranty Nahariah Restu Ramadhani
Stambuk : 10561101020
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke**", yang dimulai dari tanggal 20 – 25 Januari 2024 di Kantor KPU Kabupaten Merauke.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 25 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke





**DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN MERAUKE**

Jl. Ternate, Gg. Evadekai, Kel. Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 010 /SK/DPD/PKS/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua dan sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Merauke Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ISNIANTY NAHARIAH RESTU RAMADHANI
No. Stambuk : 10564 1101020
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian dikantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Merauke terhitung mulai tanggal 17 Januari s/d 20 Januari 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pola Calon Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pemilu 2024 di Kabupaten Merauke** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Merauke, 22 Januari 2024

**DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN MERAUKE**

KETUA

H. SLAMET S.E



SEKRETARIS

PUJIONO S.T



Dewan Pimpinan Daerah KABUPATEN MERAUKE

Nomor : 003/A/DPD-XXXIII/2024 Merauke, 21 Januari 2024
 Lampiran : -
 Perihal : Surat keterangan telah melakukan penelitian Skripsi

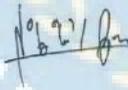
Dengan Hormat,

Dengan ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Merauke menyatakan bahwa nama tersebut di bawah adalah benar telah melakukan Penelitian di kantor DPD PSI Kab. Merauke. Mulai tertanggal 17 sampai 21 Januari 2024.

Nama : Isnianty Nahariah Restu Ramadhani
 No. Stambuk : 105641101020
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Fakultas : Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Pola Rekrukmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Merauke.

Demikian surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dewan Pimpinan Daerah
Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Merauke


 Nataniel Palittin, ST
 Ketua




 Yulius Patombe, S.Pd
 Sekretaris



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC - PDI PERJUANGAN)
KABUPATEN MERAUKE**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/KET/DPC-01/I/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Merauke, menerangkan bahwa :

Nama : ISNIANTY NAHARIAH RESTU RAMADHANI
No. Stambuk : 10564 1101020
Fakultas : Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan penelitian pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Merauke, dengan Judul Skripsi "Pola Calon Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Merauke"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 24 Januari 2024

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN MERAUKE
Masa bakti 2019 - 2024**

KETUA

KOSTANTINUS GEBZE



SEKRETARIS

MARIA YOSEFINA E. DIPAPARAMITA

*"Berjuang dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat Dengan Menjunjung Tinggi Kejujuran, Keadilan
Serta Mempertahankan Ideologi Pancasila 1 Juni 1948."*

Sekretariat : Jln. Paulus Navi Gang Ampera No.01 RT 009 RW 004 Telp. (0971) 322340; E-mail dpcpdi.merauke@gmail.com

Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke



PARTAI
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN MERAUKE

Alamat: Jl.Raya Mandala Spadem No.371 RT. 019/RW.002 Kel.Muli Merauke-Papua Tlp.081248842049/081244895230 Email:gerindra_dpcmerauke@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 009 /SK/DPC/GERINDRA/1/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

N a m a : ISNIANTY NAHARIAH RESTU RAMADHANI
 No.Stambuk : 10564 1101020
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke terhitung mulai tanggal 17 Januari s/d 20 Januari 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pola Calon Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pemilu 2024 di Kabupaten Merauke"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Merauke, 22 Januari 2024

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
KABUPATEN MERAUKE

KETUA

BUDI CAHYONO



SEKRETARIS

MARIO REY MATURBONGS



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

SURAT KETERANGAN

Nomor: 42/DPC-43.01/A.2/1/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Merauke, menerangkan bahwa :

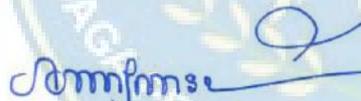
Nama : ISNIANTY NAHARIAH RESTU RAMADHANI
No. Stambuk : 10564 1101020
Fakultas : Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan penelitian pada DPC PKB Kabupaten Merauke, dengan Judul Skripsi "Pola Calon Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Merauke"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Merauke, 18 Januari 2024

**DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN MERAUKE**


HI. AL MAR'ATUS SOLIKAH, SH.I, M.A.P
KETUA


NYAMAN BUDIMAN
SEKRETARIS

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MERAUKE

JL. ARAFURA BUTI, MERAUKE – PAPUA SELATAN

Telp/Hp: 08114809910/081344420808 Email: dpcpkbmerauke2021@gmail.com Facebook: DPC PKB Merauke



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Isnianty Nahariah Restu Ramadhani

Nim : 105641101020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



N. Hasnudin, S. Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Bab I Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Apr-2024 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2359993879

File name: BAB_I_9.docx (35.27K)

Word count: 996

Character count: 6534

Bab I Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	1%
2	materiilmuku.blogspot.com Internet Source	1%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
4	idoc.pub Internet Source	1%
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
6	www.antaraneews.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Bab II Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

by Tahap Tutup

Submission date: 24-Apr-2024 10:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2359994611

File name: BAB_II_9.docx (341.02K)

Word count: 3188

Character count: 21752

Bab II Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	1%
2	yacubcikusin2.blogspot.com Internet Source	<1%
3	pknasyik.wordpress.com Internet Source	<1%
4	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1%
5	core.ac.uk Internet Source	<1%
6	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Bab III Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Apr-2024 10:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2359995642

File name: BAB_III_9.docx (23.17K)

Word count: 890

Character count: 5951

Bab III Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

ORIGINALITY REPORT

6%	4%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	4%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Bab IV Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Apr-2024 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2359996782

File name: BAB_IV_19.docx (536.08K)

Word count: 7456

Character count: 49058

Bab IV Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

ORIGINALITY REPORT

7%	6%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.tribunnews.com Internet Source	2%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
7	www.slideshare.net Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%

10	idoc.pub Internet Source	<1 %
11	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
12	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
14	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
15	id.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Bab V Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Apr-2024 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2359997474

File name: BAB_V_11.docx (19.21K)

Word count: 317

Character count: 2142

Bab V Isnianty Nahariah Restu Ramadhani 105641101020

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Isnianty Nahariah Restu Ramadhani, dilahirkan di Kabupaten Merauke pada 30 November 2000, Merupakan anak Kedua dari pasangan Sunarjo dan Ibu Hasnawati. Penulis Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Merauke dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Merauke dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Merauke dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari orang terkasih, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Pada Tahun 2024 tepatnya pada 08 Mei 2024, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian *“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Asli Papua Dalam Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Merauke”*. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti lain, dan bagi penulis sendiri, Terimakasih.